Sabda, Logika, dan Tata Kelola Kebenaran: The Cohesive Tetrad sebagai Kerangka bagi Hukum dan Kecerdasan Buatan

Ade Zaenal Mutaqin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia
Penulis korespondensi: suratkiade@gmail.com
ORCID: 0009-0001-4114-3679

Abstrak

Artikel ini membahas suatu ketegangan struktural di jantung tata kelola kebenaran kontemporer. Lembaga-lembaga modern dalam sains, hukum, dan kecerdasan buatan kerap bergantung pada arsitektur implisit logika murni yang menggabungkan saintisme, evidensialisme keras, pemisahan ketat antara fakta dan nilai, serta naturalisme kuat tentang telos dan martabat manusia. Dengan bertumpu pada perumusan kanonis The Cohesive Tetrad, artikel ini mengembangkan sebuah arsitektur alternatif di mana Sabda (Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos), logika, Qualia, Mistika sebagai dimensi intensional-spiritual dari perjalanan menuju perjumpaan langsung dengan yang transenden, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment diperlakukan sebagai ranah-ranah kebenaran yang berbeda namun saling bergantung. Secara metodologis, studi ini mengadopsi rancangan konseptual normatif yang berakar pada aksioma-aksioma martabat manusia minimal, merekonstruksi arsitektur logika murni, dan kemudian menguji kedua arsitektur tersebut terhadap aksioma-aksioma ini. Analisis ini diterapkan pada dua arena kritis, yakni rasionalitas hukum dan tata kelola kecerdasan buatan, untuk membandingkan bagaimana masing-masing arsitektur mengorganisasikan tujuan, pembatasan, dan jejak moral jangka panjang. Artikel ini berargumen bahwa hukum dan AI yang dibangun semata-mata di atas logika murni secara struktural rentan terhadap absolutisme prosedural, ketidakadilan epistemik, kekosongan legitimasi, dan intensifikasi algoritmik atas kerugian-kerugian yang sudah ada; sementara itu, hukum dan AI yang ditempatkan di dalam The Cohesive Tetrad dapat menambatkan kembali norma dan telos pada Sabda, mengintegrasikan dimensi-dimensi pengalaman dan spiritual dari kebenaran, serta menegakkan akuntabilitas melalui konfigurasi-konfigurasi Akhlak dan Intention-Trace Alignment yang dapat diamati dari waktu ke waktu.

Kata kunci: *truth governance; Sabda; logika; martabat manusia; rasionalitas hukum; tata kelola kecerdasan buatan; Qualia; Mistika; Akhlak; Intention-Trace Alignment; The Cohesive Tetrad.*

1. Pendahuluan

Perdebatan tentang kebenaran, bukti, dan legitimasi tidak lagi sekadar berlangsung di ruang-ruang seminar, tetapi telah berpindah ke jantung kehidupan institusional. Pengadilan mengandalkan saksi ahli dan berbagai alat probabilistik, pemerintah berbicara tentang kebijakan berbasis data, dan beragam platform menggunakan model pembelajaran mesin untuk menyaring informasi dan memengaruhi perilaku. Sekilas, lanskap ini tampak meneguhkan janji lama modernitas rasional: jika institusi dipandu oleh logika, didukung oleh bukti, dan dijauhkan dari hasrat sewenang-wenang, tata kelola kebenaran seharusnya menjadi lebih andal dan lebih adil. Namun munculnya ketidakpercayaan publik, polarisasi epistemik, dan krisis berulang dalam hukum serta kecerdasan buatan menunjukkan bahwa ada persoalan yang lebih mendasar.

Berbagai kajian filosofis dan empiris yang terus berkembang mulai mempertanyakan kecukupan arsitektur implisit logika murni yang menopang banyak perkembangan ini. Arsitektur ini memadukan saintisme, evidensialisme keras, pemisahan ketat antara fakta dan nilai, serta naturalisme kuat tentang telos dan martabat manusia *(Putnam 2002; Haack 2003; MacIntyre 1988)*. Rasionalitas dipahami terutama sebagai koherensi formal dan dukungan evidensial, sementara sumber-sumber moral dan spiritual bagi normativitas disisihkan ke ranah privat atau diterjemahkan menjadi preferensi lunak. Dalam praktiknya, bagaimanapun, hukum dan kecerdasan buatan terus mengajukan pengertian-pengertian yang kaya dan padat makna tentang martabat, keadilan, dan tanggung jawab yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan atau dibenarkan di dalam arsitektur ini. Institusi yang sama yang berbicara dengan bahasa netralitas dan optimasi juga harus berjanji menghormati pribadi, melindungi yang rentan, dan bertanggung jawab atas jejak moral jangka panjang mereka.

Ketegangan ini tampak sangat jelas di dua arena. Dalam ranah hukum, teori-teori tentang rasionalitas hukum berupaya mengamankan legitimasi melalui aturan yang koheren, penafsiran yang berprinsip, dan prosedur yang adil *(Fuller 1964; Dworkin 1986; Habermas 1996)*. Namun pengalaman ketidakadilan prosedural, eksklusi epistemik, dan penegakan selektif menunjukkan bahwa rasionalitas formal saja tidak cukup untuk menjaga martabat dan kepercayaan *(Fricker 2007)*. Dalam ranah kecerdasan buatan, kerangka etika dan pedoman kebijakan menekankan pentingnya keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia *(Jobin et al. 2019; Floridi and Cowls 2019; OECD 2019; UNESCO 2021)*. Pada saat yang sama, sistem algoritmik memperkuat bias historis, memanipulasi perhatian, dan mereduksi pribadi menjadi titik-titik data dalam fungsi optimasi *(O'Neil 2016; Mittelstadt et al. 2016)*. Bahasa logika murni tampak kuat, tetapi perwujudan institusionalnya berulang kali gagal memenuhi harapan moral yang mereka ajukan sendiri.

The Cohesive Tetrad diajukan sebagai jawaban atas kekurangan struktural ini. Dikembangkan dalam karya filosofis dan *preprint* sebelumnya *(Mutaqin 2025a; Mutaqin 2025b)*, The Cohesive Tetrad merumuskan empat ranah kebenaran dan praksis yang saling terkait erat. Sabda didefinisikan sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*. Logika mengorganisasikan alasan dan menguji koherensi. Qualia berkaitan dengan dimensi pengalaman dari kebenaran sebagaimana dijalani dan ditanggung oleh pribadi serta komunitas. Mistika didefinisikan sebagai *Mistika, the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent*. Keempat ranah ini kemudian ditimbang melalui Akhlak sebagai karakter moral yang dapat diamati dan melalui Intention-Trace Alignment, yang didefinisikan sebagai *Intention-Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic*

intention and epistemic-moral trace, yaitu derajat keselarasan antara niat epistemik dan jejak epistemik-moral dari waktu ke waktu. Alih-alih membiarkan satu ranah mendominasi yang lain, The Cohesive Tetrad mengajukan sebuah arsitektur di mana masing-masing memiliki peran yang jelas dan tidak satu pun secara sah dapat mengklaim kedaulatan absolut.

Artikel ini tidak hanya memaparkan The Cohesive Tetrad sebagai sekumpulan gagasan, tetapi memperlakukannya sebagai arsitektur tata kelola kebenaran dan menempatkannya dalam konfrontasi langsung dengan arsitektur logika murni yang saat ini membentuk hukum dan kecerdasan buatan. Klaim pokoknya bukan bahwa logika harus ditinggalkan, melainkan bahwa logika tidak sanggup sendirian menopang telos dan martabat. Logika perlu diposisikan ulang sebagai medium yang terdisiplin di dalam arsitektur yang dipimpin oleh Sabda, diinformasikan oleh Qualia, dimurnikan oleh Mistika, dan diaudit melalui Akhlak serta Intention-Trace Alignment. Hanya dalam arsitektur seperti ini institusi dapat secara meyakinkan mengklaim menghormati martabat manusia yang tidak dapat diganggu gugat sambil menggunakan bentuk-bentuk penalaran dan teknologi yang kompleks.

Secara metodologis, artikel ini menggunakan rancangan konseptual normatif. Pertama, artikel merekonstruksi dari literatur arsitektur implisit logika murni yang membentuk banyak pemikiran kontemporer tentang hukum dan kecerdasan buatan, serta merumuskan seperangkat aksioma martabat manusia minimal yang harus dipenuhi oleh setiap arsitektur tata kelola kebenaran yang masuk akal. Kedua, artikel merekonstruksi The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur eksplisit dengan mendefinisikan ranah-ranah intinya, menjernihkan relasi di antara ranah-ranah tersebut, dan menjelaskan peran Akhlak dan Intention-Trace Alignment sebagai alat diagnosis jangka panjang. Ketiga, artikel menguji kedua arsitektur tersebut terhadap aksioma-aksioma martabat dan menerapkannya pada dua arena kritis, yaitu rasionalitas hukum dan tata kelola kecerdasan buatan. Pertanyaannya bukan apakah Sabda atau logika lebih penting secara abstrak, melainkan bagaimana arsitektur yang berbeda atas relasi keduanya membentuk tujuan, batas, dan jejak moral institusi yang konkret.

Kontribusi artikel ini mencakup tiga sisi. Secara konseptual, artikel menawarkan cara berpikir yang terstruktur tentang tata kelola kebenaran yang tidak mereduksi normativitas menjadi keyakinan privat dan juga tidak mereduksinya menjadi rutinitas prosedural. Artikel menunjukkan bahwa banyak kritik yang sudah ada terhadap saintisme, proseduralisme, dan dampak merusak algoritme dapat dikumpulkan menjadi diagnosis tentang kegagalan arsitektural. Secara normatif, artikel berargumen bahwa The Cohesive Tetrad menyediakan arsitektur yang lebih koheren dan lebih memadai bagi manusia untuk mengorganisasikan Sabda, logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment di bawah aksioma-aksioma martabat manusia minimal. Ketika diterapkan pada hukum dan kecerdasan buatan, artikel ini memperlihatkan bagaimana arsitektur tersebut mengarah pada pilihan desain yang berbeda terkait prosedur hukum, standar pembuktian, tujuan algoritmik, dan mekanisme akuntabilitas. Dengan demikian, artikel ini membuka ruang bagi kerja lanjutan tentang bagaimana Sabda dan logika dapat diintegrasikan dalam tata kelola institusi yang semakin menentukan syarat-syarat di mana kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dijalani.

2 Ideologi Logika Murni

Argumen dalam artikel ini menuntut agar pihak yang dikritik digambarkan dengan setingkat keadilan setinggi mungkin. Jika ideologi logika murni hanya disajikan sebagai karikatur, maka "mengalahkannya" tidak akan berarti banyak. Karena itu, bagian ini merekonstruksi logika

murni sebagai suatu konstelasi klaim tentang sains, nalar, dan martabat manusia yang dapat dikenali dan masuk akal secara historis. Hanya setelah rekonstruksi itu dilakukan, kritik di bagian-bagian selanjutnya dapat dianggap serius.

2.1. Aspirasi kepada kemurnian

Di jantung logika murni terdapat sebuah aspirasi yang pada dirinya sendiri mulia. Manusia telah menyaksikan terlalu banyak contoh kekejaman yang dibenarkan atas dasar otoritas sewenang-wenang, adat yang diwarisi, atau hasrat yang tak pernah diperiksa. Sebagai tanggapan, pemikiran modern mencari bentuk-bentuk penalaran yang dapat membebaskan kita dari kesewenang-wenangan. Mimpinya sederhana sekaligus kuat: jika kita dapat menambatkan keyakinan dan institusi pada logika dan bukti, kita dapat membebaskannya dari takhayul, prasangka, dan telanjang kekuasaan.

Aspirasi ini mengambil bentuk dalam beberapa gambaran yang akrab. Sains dibayangkan sebagai sebuah proyek yang menyingkirkan bias personal, mengendalikan gangguan subjektif, dan "membiarkan alam berbicara" melalui data. Hukum dibayangkan sebagai sebuah sistem di mana putusan mengikuti aturan dan fakta, alih-alih mengikuti suasana hati atau posisi sosial hakim. Nalar publik dibayangkan sebagai sebuah forum di mana hanya argumen yang secara prinsip dapat diterima semua agen rasional yang boleh diberi bobot. Dalam setiap gambaran ini, logika berfungsi sebagai pemurni. Logika diminta untuk membakar habis segala sesuatu yang berbau kekhususan, emosi, tradisi, atau pewahyuan.

Ideologi logika murni dimulai ketika aspirasi ini mengeras menjadi doktrin. Apa yang semula berupa seruan terhadap kedisiplinan intelektual perlahan-lahan berubah menjadi sebuah gambaran tentang dunia di mana hanya satu jenis suara yang diizinkan menentukan apa yang dianggap rasional dan sah. Gambaran itu dapat dirumuskan melalui empat komponen yang saling berkaitan: saintisme, evidensialisme keras, pemisahan ketat antara fakta dan nilai, dan naturalisme kuat tentang telos dan martabat.

2.2. Empat komponen logika murni

2.2.1. Saintisme

Saintisme tidak sama dengan penghormatan terhadap sains. Saintisme adalah keyakinan bahwa metode dan gaya penalaran yang digunakan dalam sains alam mencakup, atau hampir mencakup, seluruh apa yang layak disebut pengetahuan serius. Dalam pandangan ini, jika sesuatu tidak dapat diselidiki dengan alat observasi terkendali, pengukuran, dan generalisasi, maka hal itu tidak dapat diketahui dalam arti yang kokoh. Dalam taraf terbaik, ia hanya dianggap sebagai persoalan selera, tradisi, atau keyakinan privat.

Saintisme memiliki akar yang mudah dipahami. Keberhasilan fisika, kimia, dan biologi tidak terbantahkan. Teknologi yang dibangun di atas ilmu-ilmu ini telah mengubah kehidupan manusia. Karena itu, menggoda untuk memperlakukan metode-metode tersebut sebagai standar emas bagi semua bentuk penyelidikan. Bahaya mulai muncul ketika godaan ini berubah menjadi sikap eksklusif. Bidang-bidang yang berurusan dengan makna, normativitas, atau transendensi diberitahu bahwa mereka harus meniru fitur-fitur permukaan sains alam atau menerima status marjinal.

Di dalam ideologi logika murni, saintisme bertindak sebagai penjaga gerbang. Ia menyaring setiap rujukan kepada Sabda sebagai *Revelatory Word*, sebab Sabda tidak hadir sebagai objek yang dapat diukur secara eksperimental di antara objek-objek lainnya. Ia juga menyaring banyak aspek Qualia dan Mistika, karena pengalaman hidup dan orientasi intensional menuju yang transenden tidak tampak seperti data laboratorium. Yang tersisa di dalam gerbang adalah proposisi yang dapat diucapkan dengan gaya yang menyerupai sains alam.

2.2.2. Evidensialisme keras

Evidensialisme keras menyatakan bahwa suatu keyakinan hanya dapat diterima secara rasional jika seimbang dengan kumpulan bukti yang secara prinsip dapat dibuat eksplisit dan dibagikan secara publik. Keraguan menjadi default; kepercayaan harus diperoleh. Sekilas, ini tampak seperti seruan sederhana untuk kejujuran intelektual: kita tidak boleh percaya lebih kuat daripada apa yang dibenarkan oleh bukti kita.

Dalam bentuk-bentuk yang lebih ketat, bagaimanapun, evidensialisme mulai tidak mempercayai setiap jenis kepercayaan dasar yang wajar yang tidak berakar pada argumen lebih lanjut. Iman diperlakukan sebagai irasional secara definisional. Ia juga menjadi curiga terhadap keyakinan moral yang tidak mudah diubah menjadi klaim evidensial. Lama-kelamaan, ini menghasilkan gambaran tentang rasionalitas di mana agen manusia diharapkan hampir sepenuhnya hidup dalam sikap menangguhkan penilaian, kecuali pada wilayah di mana argumen dan data telah "berbicara".

Di dalam ideologi logika murni, evidensialisme keras menopang gagasan bahwa Sabda tidak dapat menjadi sumber pengetahuan. Jika Sabda hendak dipertimbangkan sama sekali, ia harus terlebih dahulu melewati filter logis dan empiris yang ditempatkan di atasnya sebagai hakim. Otoritas pewahyuan dengan demikian dibalik. Alih-alih Sabda yang mengadili penggunaan logika dan bukti kita, logika dan bukti diperlakukan sebagai hakim atas Sabda.

2.2.3. Pemisahan ketat antara fakta dan nilai

Komponen ketiga adalah penegasan garis pemisah yang tajam antara fakta dan nilai. Fakta dipahami sebagai deskripsi tentang bagaimana dunia itu ada. Nilai mengekspresikan bagaimana seseorang ingin dunia itu adanya. Dalam bentuk klasik pembedaan ini, logika dan sains dianggap menempati sisi faktual, sementara moralitas, agama, dan estetika diasosiasikan dengan ranah preferensi subjektif atau intersubjektif.

Tujuan awalnya kembali mudah dimengerti. Mencampuradukkan deskripsi faktual dengan persetujuan moral kerap menimbulkan kerusakan serius. Namun pemisahan ketat ini memiliki efek samping. Ia mendorong anggapan bahwa kebenaran hanya dimiliki oleh sisi faktual, sementara normativitas dibiarkan berjuang memperebutkan pengaruh tanpa hak untuk mengklaim kebenaran.

Di dalam ideologi logika murni, pemisahan ini menancapkan baji di dalam wacana manusia. Pernyataan-pernyataan yang termasuk dalam Sabda, seperti perintah, janji, dan klaim-klaim perjanjian, didorong ke sisi nilai dan dilucuti dari martabat kognitif. Klaim tentang martabat manusia menjadi sulit dirumuskan sebagai kebenaran. Klaim-klaim itu mulai tampak seperti preferensi yang ditekankan: perasaan kuat yang ditopang oleh konsensus sosial, tetapi tidak bertumpu pada struktur realitas.

2.2.4. Naturalisme kuat tentang telos dan martabat

Komponen terakhir adalah bentuk naturalisme kuat yang berpendapat bahwa semua pembicaraan yang sah tentang telos dan martabat pada akhirnya harus diterjemahkan ke dalam istilah-istilah natural, seperti kapasitas evolusioner, stabilitas sosial, atau kesejahteraan psikologis. Dalam pandangan ini, tidak ada tatanan tujuan yang transenden yang mendahului pilihan manusia. Telos adalah sesuatu yang kita proyeksikan ke dunia, bukan sesuatu yang kita terima. Martabat adalah konstruksi berguna untuk mengatur perilaku, bukan cerminan tatanan yang lebih dalam.

Naturalisme ini meratakan medan. Manusia mungkin lebih kompleks daripada hewan lain, tetapi tidak berbeda dalam jenis. Status khusus apa pun yang kita berikan kepada manusia harus sepenuhnya dibenarkan dengan merujuk pada ciri-ciri kontingen dari dunia natural atau sosial. Setelah ciri-ciri itu berubah, status tersebut pada prinsipnya dapat dinegosiasikan ulang.

Di dalam ideologi logika murni, naturalisme kuat memastikan bahwa setiap klaim tentang telos yang lebih tinggi harus diterjemahkan ke dalam bahasa deskriptif. Sabda tidak diizinkan berbicara langsung tentang tujuan. Dalam taraf terbaik, Sabda hanya menjadi objek kajian psikologi, sosiologi, atau sejarah intelektual. Sumber otoritatif bagi norma dan telos kini dipahami sebagai preferensi manusia yang diagregasi melalui suatu prosedur rasional, atau proses impersonal evolusi dan adaptasi.

2.3. Dari filsafat ke "akal sehat" institusional

Keempat komponen yang baru saja dijelaskan biasanya tidak hadir secara terpisah. Mereka berjalan bersama dan, seiring waktu, terbenam di dalam praktik-praktik institusional. Pada titik itu, ideologi logika murni tidak lagi perlu diperdebatkan secara eksplisit. Ideologi ini mengeras menjadi akal sehat.

Di universitas, hal ini tampak dalam cara disiplin-disiplin ilmu diberi peringkat. Bidang-bidang yang menyerupai sains alam diberi prestise lebih tinggi dan sumber daya lebih besar. Disiplin yang bekerja dengan Sabda, makna, dan normativitas ditoleransi, kadang dihormati karena alasan kultural, tetapi diam-diam diperlakukan kurang sentral bagi "bisnis serius" pengetahuan. Dalam iklim semacam ini, para sarjana yang ingin dianggap serius sering merasa tertekan untuk mengode ulang pertanyaan mereka dalam istilah yang semata-mata logis atau empiris.

Dalam hukum, ideologi yang sama tampak dalam kecenderungan mereduksi rasionalitas hukum menjadi sekadar kebenaran prosedural dan kecukupan bukti. Sistem bertanya: apakah aturan yang tepat telah diterapkan, apakah jenis bukti yang benar telah diajukan, apakah langkah-langkah yang semestinya telah diikuti. Pertanyaan-pertanyaan ini penting, tetapi ketika mereka mendominasi tanpa sisa, pertanyaan yang lebih dalam-apakah hasil hukum tersebut sungguh menghormati martabat manusia-tergeser ke pinggir atau diasumsikan tanpa diperiksa sungguh-sungguh.

Dalam teknologi dan AI, ideologi ini tampak dalam harapan bahwa data yang cukup dan model yang canggih dapat menggantikan kebutuhan akan penilaian moral yang tebal. *Risk scores*, sistem rekomendasi, dan alat *predictive policing* dibangun atas asumsi bahwa jika suatu algoritme sudah logis, terkalibrasi secara empiris, dan bebas dari bias teknis tertentu, maka

keluarannya aman untuk dipercaya. Pertanyaan apakah keputusan-keputusan tertentu seharusnya diautomasikan sama sekali kerap tidak diajukan.

Di setiap ranah, pola yang sama berulang. Logika, yang dipahami dalam arti sempit sebagai disiplin formal dan empiris, diberi peran yang secara halus meluas dari alat menjadi penguasa. Logika memutuskan bukan hanya bagaimana kita seharusnya menalar tentang dunia, tetapi juga jenis alasan seperti apa yang diizinkan diperhitungkan sebagai alasan publik yang mengikat.

2.4. Daya tarik dan kekuatan logika murni

Akan menjadi kekeliruan jika menggambarkan logika murni hanya dari sisi bahayanya. Ideologi ini memiliki daya tarik yang tidak dangkal. Jika kita mengabaikannya, kita akan meremehkan daya cengkeramnya.

Pertama, logika murni menjanjikan perlindungan dari kesewenang-wenangan. Ketika keputusan hukum atau politik dibenarkan dengan merujuk pada prosedur bersama dan bukti yang dapat diakses publik, warga menjadi kurang rentan terhadap keinginan privat para pemimpin. Logika tampak menawarkan perisai terhadap tirani.

Kedua, logika murni membentuk citra kesatuan yang kuat. Jika semua agen rasional terikat oleh norma-norma inferensi yang sama dan oleh kumpulan fakta empiris yang sama, maka secara prinsip ruang bagi perbedaan mendalam dapat dipersempit. Hal ini sangat menarik dalam masyarakat majemuk, di mana rujukan kepada Sabda dan tradisi dikhawatirkan sebagai sumber konflik.

Ketiga, logika murni tampak inklusif. Siapa pun pada prinsipnya dapat mempelajari aturan inferensi dan metode penyelidikan empiris. Tidak seorang pun perlu menjadi anggota komunitas iman tertentu atau berbagi warisan kultural yang tebal agar dapat berpartisipasi dalam diskursus rasional.

Kekuatan-kekuatan ini nyata. Kritik yang dikembangkan dalam artikel ini tidak menolaknya. Kritik ini justru akan berargumen bahwa kebaikan-kebaikan yang hendak dilindungi oleh logika murni tidak dapat dipertahankan secara utuh di dalam batas-batas ideologisnya sendiri. Ketika logika mengklaim kedaulatan atas semua ranah kebenaran, perisai itu mulai retak. Kesatuan yang dijanjikannya menjadi rapuh. Inklusivitas yang ingin diamankan ternyata tidak lengkap, karena memaksa banyak warga untuk memisahkan keyakinan terdalam mereka dari penalaran publik mereka.

2.5. Ringkasan

Ideologi logika murni dengan demikian dapat diringkas sebagai berikut. Ia adalah himpunan komitmen yang mengangkat satu gaya rasionalitas tertentu, yang lahir dari keberhasilan sah sains, menjadi standar universal. Saintisme mempersempit medan pengetahuan serius pada apa yang tampak seperti sains alam. Evidensialisme keras mencurigai setiap kepercayaan dasar yang wajar yang tidak berakar pada argumen dan bukti eksplisit. Pemisahan ketat fakta dan nilai melucuti klaim moral dan revelatori dari martabat kognitif. Naturalisme kuat tentang telos dan martabat menutup kemungkinan rujukan pada sumber norma yang transenden.

Begitu komitmen-komitmen ini terinstitusionalisasi, Sabda menjadi diprivatisasi, dipelajari sebagai objek psikologis atau historis, atau secara fungsional dibungkam. Qualia dipampatkan menjadi metrik dan indikator. Mistika dipaksa tinggal di ruang batin tanpa peran yang diakui dalam penalaran publik. Logika, dalam bentuknya yang sempit, dinobatkan sebagai satu-satunya bahasa kebenaran yang sepenuhnya sah.

Bagian berikutnya akan berargumen bahwa mahkota ini terlalu berat untuk dipikul logika. Dengan memeriksa kembali ketegangan internal dalam saintisme, evidensialisme, pemisahan fakta-nilai, dan naturalisme, kita akan melihat bahwa logika murni pada akhirnya tidak mampu menopang klaim-klaim yang ingin dibelanya sendiri. Dari sana akan terbuka ruang bagi The Cohesive Tetrad untuk diperkenalkan, bukan sebagai penolakan terhadap logika, melainkan sebagai arsitektur di mana logika menemukan martabatnya yang layak di bawah cakrawala Sabda, Qualia, dan Mistika.

3. Kritik internal terhadap logika murni

Ideologi logika murni menampilkan diri sebagai sahabat kejernihan. Ia mengklaim menghilangkan kekacauan dengan menegaskan bahwa hanya hal-hal yang dapat diperdebatkan secara logis dan didukung secara empiris yang layak menyandang nama pengetahuan. Dalam bagian ini, saya tidak menentang ambisi tersebut dari luar. Sebaliknya, saya menanyakan apa yang terjadi ketika logika murni mengarahkan perangkatnya kepada dirinya sendiri. Mampukah ia membenarkan norma-norma inferensinya sendiri, tuntutannya sendiri atas bukti, pemisahan yang dibuatnya sendiri antara fakta dan nilai, serta naturalismenya sendiri tentang telos dan martabat, tanpa diam-diam bergantung pada hal-hal yang justru diklaimnya dikeluarkan?

Jawabannya, sebagaimana akan saya argumentasikan, adalah tidak. Ketika diperiksa dengan sabar, setiap pilar logika murni ternyata bersandar pada bentuk-bentuk kepercayaan, normativitas, dan kedalaman yang tidak dapat dihasilkannya dari gambaran dunianya sendiri. Kritik ini bersifat internal. Logikalah yang menyingkap keterlaluan logika.

3.1. Masalah pemendasaran diri

Setiap sistem yang menuntut alasan pada akhirnya harus berhadapan dengan sebuah pertanyaan yang sederhana tetapi tak mengenal ampun. Apa yang membenarkan norma-norma penalaran itu sendiri yang sudah diasumsikan oleh sistem tersebut? Jika setiap keyakinan harus ditopang oleh argumen lebih lanjut, dan setiap argumen harus bertumpu pada norma-norma inferensi yang mendahuluinya, maka rantai itu entah berlanjut tanpa akhir, runtuh ke dalam bentuk sirkular, atau berhenti pada sesuatu yang tidak lagi didasarkan pada argumen lain.

Logika murni berusaha hidup dengan dua opsi pertama. Ia memperlakukan sirkularitas sebagai cacat dan regres tak berhingga sebagai masalah, tetapi terus berbicara seolah-olah norma-norma inferensinya sendiri secara *self-evident* mengikat setiap agen rasional. Ketika ditanya mengapa hukum non-kontradiksi, tuntutan penetapan probabilitas yang konsisten, atau kaidah-kaidah konfirmasi empiris harus ditaati, jawabannya biasanya bergeser ke register yang berbeda. Seseorang akan diberitahu entah bahwa menyangkal norma-norma tersebut adalah "irasional secara definisional", atau bahwa meninggalkannya akan membuat praktik yang koheren menjadi mustahil. Dalam kedua kasus, sistem itu berhenti pada sebuah komitmen yang tidak lagi dibenarkan oleh argumen lebih lanjut. Struktur ini mencerminkan perdebatan lama

dalam epistemologi tentang regres, fondasionalisme, dan batas-batas koherensisme murni, di mana bahkan uraian yang paling ketat sekalipun mengakui bahwa beberapa komitmen harus diterima, bukan diturunkan *(Haack 2003; Putnam 2002).*

Tak satu pun dari ini khas bagi logika. Setiap praktik, termasuk praktik menerima Sabda, hidup dari beberapa titik awal yang tidak dideduksi dari premis-premis sebelumnya. Masalah bagi logika murni muncul hanya ketika ia menyangkal fakta ini. Ia menampilkan diri sebagai *view from nowhere*, sebuah praktik yang secara prinsip dapat memberikan alasan bagi semua yang diterimanya. Namun kehidupannya sendiri bergantung pada landasan kepercayaan terhadap pola-pola inferensi tertentu, bentuk-bentuk pengalaman tertentu, dan kapasitas batin manusia itu sendiri untuk menjangkau kebenaran. Ketika logika menolak mengakui ketergantungan ini, ia mengaburkan kekerabatannya dengan bentuk-bentuk penerimaan penuh komitmen yang lain.

3.2. Batas-batas evidensialisme keras

Evidensialisme keras bersikeras bahwa keyakinan rasional harus menyesuaikan diri secara ketat dengan bukti yang dapat dibagikan secara publik. Dalam bentuk yang lebih moderat, prinsip ini merupakan disiplin yang sehat terhadap *wishful thinking*. Namun dalam rumusan yang lebih ketat, evidensialisme mulai terurai oleh bobotnya sendiri.

Pertimbangkan kasus-kasus sederhana. Seorang ilmuwan percaya bahwa instrumennya secara umum andal, bahwa hasil-hasil yang dilaporkan rekan sejawat yang bereputasi bukanlah fabrikasi total, bahwa jurnal yang ia baca tidak secara acak menukar gambar atau angka antar naskah. Keyakinan-keyakinan ini tidak selalu ditopang oleh penyelidikan independen. Keyakinan tersebut disangga oleh jaringan kepercayaan, norma profesional, dan pengalaman terakumulasi. Jika ia diwajibkan menghadirkan bukti eksplisit untuk setiap simpul dalam jaringan ini sebelum memperlakukannya sebagai dapat diterima secara rasional, ia tidak akan pernah bisa mulai.

Hal yang sama berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang cukup mempercayai ingatan mereka untuk bertindak, tanpa setiap pagi menyusun kembali rangkaian argumen guna membuktikan bahwa mereka benar-benar sudah mengunci pintu kemarin. Mereka mempercayai kesaksian orang lain, dalam batas kewajaran, tanpa menuntut rantai bukti penuh setiap kali sebuah fakta sederhana dikomunikasikan. Mereka percaya bahwa makna kata-kata tidak spontan berbalik arah dari satu hari ke hari berikutnya. Kajian empiris tentang penalaran bermotivasi dan praktik riset yang meragukan menunjukkan bahwa agen tidak sekadar menyeimbangkan setiap keyakinan dengan bukti yang tersedia secara formal, melainkan menegosiasikannya melalui campuran kepercayaan, kebajikan, dan kerentanan *(Kunda 1990; John et al. 2012).*

Evidensialisme keras, ketika didorong hingga batasnya sendiri, tidak dapat membenarkan bentuk-bentuk kepercayaan ini tanpa menjatuhkan diri sendiri. Jika ia menuntut bukti eksplisit bagi setiap keyakinan, termasuk keyakinan bahwa bukti merupakan penuntun yang andal, ia runtuh ke dalam skeptisisme. Jika ia mengecualikan beberapa keyakinan dari tuntutan tersebut dengan alasan “secara praktis niscaya”, maka ia sudah mengakui bahwa tidak semua komitmen rasional berakar dengan cara yang sama.

Apa yang sesungguhnya terjadi dalam penalaran ilmiah dan keseharian jauh lebih halus. Bentuk-bentuk kepercayaan tertentu berfungsi sebagai titik awal. Kepercayaan-kepercayaan ini bukan lompatan buta, melainkan orientasi yang bertahan lama dan dapat diperhalus serta dikoreksi dari waktu ke waktu. Dalam skala kecil dan dalam cakupan terbatas, struktur ini menyerupai Sabda. Kepercayaan-kepercayaan tersebut tidak dideduksi dari bukti; ia diterima terlebih dahulu, lalu diuji dalam praktik.

Logika murni sangat bergantung pada bentuk-bentuk kepercayaan semacam ini, tetapi kisah resminya kesulitan mengakui hal tersebut. Ia lebih suka berbicara seolah-olah segala sesuatu tegak atau runtuh bersama argumen dan bukti eksplisit, padahal keberadaannya sendiri sebagai sebuah praktik sudah mengandaikan lebih banyak daripada yang dapat dibuktikannya.

3.3. Keterjeratan fakta dan nilai

Ideologi logika murni bertumpu pada garis pemisah yang bersih antara fakta dan nilai. Fakta menggambarkan bagaimana sesuatu itu ada. Nilai mengekspresikan preferensi tentang bagaimana sesuatu seharusnya. Logika dan sains ditempatkan di sisi faktual. Sabda dan moralitas digolongkan ke ranah nilai dan diperlakukan sebagai sekunder. Pembedaan ini menjanjikan kejernihan. Ia memungkinkan logika mengklaim bahwa ia berurusan dengan kebenaran, sementara nilai menjadi urusan pilihan.

Dalam praktik, bagaimanapun, garis ini jauh kurang bersih. Kerja ilmiah dimulai dengan keputusan tentang fenomena apa yang layak diukur, perbedaan mana yang penting, dan keluaran mana yang dianggap signifikan. Ini bukan semata-mata pertanyaan faktual. Pertanyaan-pertanyaan tersebut melibatkan penilaian tentang relevansi dan kepentingan. Cara sebuah studi tentang pengangguran dirancang, misalnya, mencerminkan asumsi-asumsi sarat nilai tentang kehidupan dan aktivitas mana yang dihitung sebagai “pekerjaan” dan mengapa.

Bahkan pemilihan dan penggunaan kategori dalam sains membawa bobot normatif. Mengklasifikasikan perilaku, tubuh, atau kebudayaan melibatkan pilihan-pilihan yang dapat memperkuat atau menantang pola-pola kekuasaan yang sudah ada. Melukiskan suatu pola sebagai “gangguan” alih-alih “perbedaan”, atau sebagai “risiko” alih-alih “variasi”, bukanlah tindakan netral. Kategori yang kita pakai untuk menggambarkan fakta membentuk apa yang kita lihat sebagai masalah dan apa yang kita anggap dapat diterima.

Praktik hukum menunjukkan keterjeratan yang sama. Pengadilan tidak sekadar menemukan fakta lalu menerapkan aturan seperti mesin. Pengadilan memutuskan fakta mana yang relevan, kesaksian mana yang kredibel, dan kerugian mana yang cukup serius untuk layak mendapat pemulihan. Keputusan-keputusan ini dipandu oleh pemahaman normatif tentang martabat, tanggung jawab, dan keadilan. Jika pemahaman-pemahaman tersebut diperlakukan hanya sebagai preferensi, seluruh klaim bahwa hukum lebih dari sekadar kekuatan terorganisir mulai terkikis.

Ketika fakta dan nilai demikian terjalin, menjadi sulit mempertahankan gagasan bahwa kebenaran hanya berada di sisi faktual. Nilai hadir di setiap tahap penyelidikan, bukan hanya pada momen penarikan kesimpulan moral. Nilai menuntun perhatian, membentuk konsep, dan menginformasikan penilaian tentang signifikansi. Ini tidak berarti bahwa segala sesuatu boleh-boleh saja. Ini berarti bahwa pencarian kebenaran sudah tersusun secara normatif, entah kita mengakuinya atau tidak. Para filsuf sains telah menunjukkan bahwa pilihan-pilihan sarat nilai

semacam ini bukanlah kebisingan kebetulan, melainkan ciri-ciri struktural dari penyelidikan itu sendiri *(Putnam 2002; MacIntyre 1988).*

Logika murni dapat merespons dengan menegaskan bahwa unsur-unsur nilai ini sendiri harus dibawa ke bawah kendali rasional, mungkin melalui prosedur pembenaran publik atau konsensus. Respons ini penting, tetapi tidak menghapus poin dasarnya. Tidak ada *view from nowhere*. Bahkan upaya mengatur nilai secara rasional pun sudah mengandaikan terlebih dahulu pengertian tentang apa yang dianggap sebagai alasan yang baik dan tata susunan yang dapat dibenarkan. Pada kedalaman itu, pemisahan bersih antara fakta dan nilai mulai tampak sebagai fiksi yang nyaman.

Dari perspektif The Cohesive Tetrad, inilah yang memang seharusnya kita perkirakan. Qualia mengingatkan bahwa pengalaman dan penilaian tidak pernah sepenuhnya dapat dipisahkan. Akhlak dan Intention-Trace Alignment menunjukkan bahwa cara kita mencari dan menggunakan pengetahuan sudah merupakan perkara moral. Sabda menyediakan cakrawala di mana nilai bukan sekadar preferensi, tetapi respons terhadap tatanan norma dan telos yang mendahului. Ketika logika murni menyangkal hal ini, ia tidak menyingkirkan normativitas; ia hanya mengaburkan sumber-sumbernya.

3.4. Martabat tanpa kedalaman

Barangkali ujian yang paling membuka tabir bagi logika murni adalah kasus martabat manusia. Tatanan hukum dan politik modern kerap merujuk pada martabat sebagai dasar hak-hak yang tidak boleh diperdagangkan. Konstitusi, traktat, dan putusan pengadilan berbicara seakan-akan ada sesuatu dalam diri manusia yang menuntut penghormatan terlepas dari status sosial, produktivitas, atau kegunaan. Bahasa ini berfungsi, pada praktiknya, sebagai semacam Sabda yang disekularisasi. Ia menamai sebuah klaim yang tidak berasal semata-mata dari kesepakatan manusia. Instrumen-instrumen hak asasi manusia kontemporer dan kerangka etika untuk kecerdasan buatan menginvokasi martabat secara tepat dalam cara yang hampir-fondasional ini, sering kali memperlakukannya sebagai dasar yang tak dapat dinegosiasikan bagi hak-hak dan pembatasan atas kekuasaan *(Jobin et al. 2019; Floridi and Cowls 2019; OECD 2019; UNESCO 2021).*

Namun di dalam ideologi logika murni, sulit menjelaskan mengapa bahasa semacam itu harus diterima apa adanya. Jika semua normativitas harus diekspresikan dalam istilah naturalistik, maka pada akhirnya martabat harus direduksi menjadi sesuatu seperti konsensus sosial, keuntungan evolusioner, atau kesejahteraan psikologis. Masing-masing reduksi ini membawa biaya.

Jika martabat didasarkan pada konsensus, maka isinya hanya setangguh kesepakatan yang menopangnya. Ketika kelompok-kelompok dengan kepentingan berbeda bernegosiasi, pihak yang kuat dapat mengubah konsensus sedemikian rupa sehingga perlindungan bagi yang rentan tergerus. Dalam situasi seperti ini, bahasa tentang hak-hak yang "tak dapat diganggu gugat" mulai tampak sebagai retorika yang menyembunyikan permainan kekuasaan di bawahnya.

Jika martabat didasarkan pada keuntungan evolusioner, martabat menjadi sasaran bergerak. Sifat-sifat yang menguntungkan dalam satu konteks ekologis atau teknologi dapat menjadi merugikan dalam konteks lain. Di dalam bingkai evolusioner yang ketat, tidak ada alasan

khusus untuk memperlakukan semua anggota spesies sebagai sama-sama layak dihormati. Mereka yang sifat-sifatnya dinilai kurang adaptif dapat saja diberi klaim yang lebih lemah.

Jika martabat didasarkan pada kesejahteraan psikologis, martabat berisiko runtuh menjadi bentuk pemuasan preferensi yang dimurnikan. Melindungi martabat menjadi setara dengan memastikan bahwa individu merasa dihormati dan dihargai. Meskipun ini bukan hal sepele, hal itu tidak mencapai taraf klaim yang tak bersyarat. Dalam situasi di mana pemenuhan kesejahteraan sebagian orang menuntut biaya besar dari yang lain, kesejahteraan saja tidak menjelaskan mengapa beberapa pelanggaran sama sekali tidak boleh dilakukan, bahkan jika pelanggaran tersebut menghasilkan manfaat agregat yang besar.

Dalam praktik, pengadilan dan lembaga hak asasi manusia kerap memperlakukan martabat seolah-olah memiliki kedalaman yang tak dapat ditangkap oleh reduksi-reduksi ini. Mereka berbicara seakan-akan memang ada telos yang tertulis dalam diri manusia yang menetapkan batas terhadap apa yang boleh dilakukan kepada seseorang, bahkan oleh keputusan bulat suatu mayoritas. Mereka bertindak seakan-akan ada hal-hal yang salah bukan hanya menurut konsensus saat ini, tetapi menurut suatu standar yang mengadili konsensus itu sendiri.

Logika murni bergantung pada tata bahasa yang lebih dalam ini, tetapi tidak mampu menghasilkannya. Logika murni dapat menggambarkan bagaimana bahasa martabat bekerja, mengukur dampak sosialnya, dan memasukkannya ke dalam prosedur pengambilan keputusan. Namun di atas landasannya sendiri, logika murni tidak dapat menjelaskan mengapa martabat harus dihormati ketika martabat itu berbenturan dengan kepentingan kolektif atau preferensi individual. Ketika ideologi logika murni menuntut logika mengemban peran ini, ia menuntut dari logika suatu jenis otoritas yang tidak dapat dibenarkan oleh logika itu sendiri.

Dari sudut pandang The Cohesive Tetrad, ini adalah bukti adanya Sabda yang tersembunyi. Institusi-institusi modern terus bertindak seakan-akan ada tatanan norma dan telos yang mendahului kesepakatan manusia. Mereka tidak menyebutnya pewahyuan, tetapi mereka memperlakukannya sebagai sesuatu yang berbicara dengan otoritas melampaui manusia. Celah antara kesetiaan resmi mereka pada logika murni dan ketergantungan praktis mereka pada bahasa martabat yang nyaris-revelatori merupakan tanda ketegangan internal, bukan keseimbangan yang stabil.

3.5. Kesimpulan sementara: logika di tepi mandatnya

Kritik internal yang dikembangkan dalam bagian ini dapat dirumuskan secara singkat. Logika murni, ketika mencoba berfungsi sebagai satu-satunya penguasa tertinggi rasionalitas, mendapati dirinya berada dalam posisi yang tidak dapat dipertahankannya tanpa bantuan terselubung. Ia bergantung pada bentuk-bentuk kepercayaan yang tidak dapat diturunkannya dari metodenya sendiri. Ia bekerja di dalam medan fakta dan nilai yang saling terjerat, yang bukan ciptaannya sendiri. Ia bersandar pada konsep-konsep martabat dan telos yang memikul bobot lebih besar daripada yang dapat ditanggung oleh kosakata naturalistiknya.

Tak satu pun dari ini berarti bahwa logika dapat dibuang. Sebaliknya, analisis ini menunjukkan betapa kita membutuhkan disiplin logis untuk menjernihkan, menguji, dan menahan klaim-klaim kita. Yang gagal bukanlah logika itu sendiri, melainkan upaya menjadikan logika satu-satunya bahasa kebenaran yang sah. Ketika logika diminta memikul beban tersebut, ia entah

runtuh ke dalam skeptisisme atau meminjam-tanpa pengakuan-dari ranah-ranah yang justru diklaimnya ditinggalkan.

Inilah celah di mana The Cohesive Tetrad harus ditempatkan. Masalahnya bukanlah bahwa logika terlalu kuat, melainkan bahwa logika telah diberi jabatan yang keliru. Logika telah diperlakukan sebagai raja, padahal sesungguhnya ia dipanggil untuk menjadi menteri. Tugas bagian berikutnya adalah memaparkan The Cohesive Tetrad sebagai sebuah arsitektur di mana Sabda, Logic, Qualia, dan Mistika masing-masing dapat menjalankan peran sewajarnya dalam tata kelola kebenaran, dengan Akhlak dan Intention-Trace Alignment berfungsi sebagai diagnostik jangka panjang atas integritas.

4. The Cohesive Tetrad sebagai Arsitektur Tata Kelola Kebenaran

Kritik internal terhadap logika murni meninggalkan kita dengan satu tugas yang belum terselesaikan. Kita telah melihat bahwa ideologi logika murni tidak mampu sepenuhnya membenarkan norma-norma inferensinya sendiri, tidak sanggup menampung keterjeratan fakta dan nilai, dan tidak dapat menopang kedalaman martabat manusia yang secara diam-diam sudah diasumsikan oleh institusi modern. Namun kritik saja tidak cukup. Jika logika murni tidak memadai sebagai arsitektur tata kelola kebenaran, apa yang dapat menggantikannya tanpa tergelincir ke dalam kesewenang-wenangan atau nostalgia.

The Cohesive Tetrad diajukan sebagai jawaban atas pertanyaan arsitektural tersebut, bukan sebagai metafora longgar, melainkan sebagai konfigurasi terstruktur dari ranah-ranah kebenaran yang dapat diperiksa dan diperdebatkan. Bertolak dari karya terdahulu yang memperkenalkan The Cohesive Tetrad sebagai kerangka filosofis dan etis bagi tata kelola kebenaran *(Mutaqin 2025a, 2025b)*, bagian ini menyajikan kerangka tersebut secara eksplisit sebagai sebuah arsitektur. Enam elemen inti dan relasinya dibedakan sebagai berikut:

1. Sabda sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*.
2. Logika sebagai ranah penalaran formal dan inferensial.
3. Qualia sebagai medan pengalaman hidup, berwujud, dan sosial.
4. Mistika sebagai *Mistika, the intentional spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent*.
5. Akhlak sebagai karakter moral yang dapat diamati dan terbentuk dari waktu ke waktu.
6. Intention-Trace Alignment sebagai *Intention-Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic moral trace*.

Tujuan bagian ini sekaligus bersifat deskriptif dan evaluatif. Bagian ini menjelaskan bagaimana The Cohesive Tetrad memahami kebenaran sebagai sesuatu yang diartikulasikan lintas sejumlah ranah, dan menilai bagaimana susunan seperti ini dapat menjelaskan praktik-praktik yang sudah ada dalam hukum dan kecerdasan buatan dengan lebih baik dibandingkan ideologi logika murni. Pergerakannya adalah dari gambaran kebenaran yang satu bahasa menuju gambaran multi ranah, di mana setiap ranah memiliki integritasnya sendiri dan bentuk-bentuk distorsi khas ketika ia dipisahkan dari yang lain.

4.1. Dari kebenaran satu bahasa ke kebenaran multi ranah

Di bawah ideologi logika murni, kebenaran dibayangkan sebagai rezim satu bahasa (*monolingual*). Hanya ada satu bahasa yang dianggap layak bagi wacana serius, yakni bahasa

logika dan sains empiris. Kosakata moral dan spiritual mungkin memiliki nilai ekspresif atau motivasional, tetapi tidak diperlakukan sebagai pembawa kebenaran dalam pengertian yang sama. Dalam taraf terbaik, kosakata tersebut diterjemahkan ke dalam istilah yang lebih netral; dalam taraf terburuk, ia disingkirkan ke keyakinan privat.

The Cohesive Tetrad menawarkan gambaran yang berbeda. Titik berangkatnya adalah pengamatan bahwa dalam kehidupan manusia yang nyata, klaim atas kebenaran memang sudah hadir dalam beberapa register. Ada pernyataan bahwa peristiwa tertentu sungguh terjadi, bahwa relasi kausal tertentu sungguh ada, bahwa tindakan tertentu sungguh adil atau tidak adil, bahwa pengalaman tertentu memanifestasikan rahmat atau keterabaian, bahwa kehidupan tertentu menunjukkan integritas atau korupsi. Ini bukan sekadar perasaan berbeda tentang fakta-fakta netral yang sama. Ini adalah jenis-jenis klaim kebenaran yang berbeda.

Di dalam arsitektur The Cohesive Tetrad, berbagai jenis klaim ini tidak dipaksa masuk ke dalam satu cetakan, juga tidak dibiarkan kacau. Setiap ranah dinamai, diberi peran yang berbeda, dan ditempatkan dalam relasi dengan ranah-ranah lain.

Sabda menamai sumber utama norma dan telos. Sabda menunjuk pada keyakinan bahwa manusia disapa oleh sebuah Word yang bukan ciptaan mereka sendiri, sebuah Word yang berbicara dengan otoritas tentang tujuan keberadaan mereka dan bagaimana mereka seharusnya hidup.

Logika menamai praktik-praktik di mana klaim dirumuskan, dihubungkan, diuji, dan disistematisasi, termasuk disiplin inferensi formal dan konfirmasi empiris.

Qualia menamai ranah di mana konsekuensi dari klaim kebenaran dirasakan dan diamati dalam kehidupan personal dan komunal, termasuk atmosfer kepercayaan, ketakutan, harapan, dan kerugian yang mengelilingi institusi dan teknologi.

Mistika menamai orientasi dan pemurnian niat dalam pencarian kebenaran dan dalam penggunaan kekuasaan, termasuk disiplin-disiplin yang dengannya komunitas menguji kasih dan ketakutan yang mengarahkan penalaran mereka.

Akhlak dan Intention-Trace Alignment menyediakan perangkat diagnosis jangka panjang. Keduanya menanyakan apakah karakter yang dibentuk oleh sebuah rezim kebenaran dan jejak yang dapat diamati dari tindakannya sepanjang waktu sungguh-sungguh selaras dengan telos yang diakuinya.

Berpindah dari rezim satu bahasa menuju rezim multi ranah bukan berarti bahwa segala sesuatu boleh disebut kebenaran. Perpindahan ini berarti bahwa klaim-klaim diadili di dalam ranah yang menjadi miliknya dan dalam relasinya dengan ranah lain. Pertanyaan utamanya bukan lagi apakah logika sendiri dapat memutuskan segalanya, melainkan apakah logika ditempatkan secara tepat di dalam keseluruhan arsitektur.

4.2. Sabda: sumber otoritatif bagi norma dan telos

Sabda, dalam pengertian yang digunakan di sini, merujuk pada *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*. Sabda tidak terbatas pada satu tradisi keagamaan atau satu korpus teks suci. Sabda menunjuk pada keyakinan yang lebih mendasar bahwa manusia

disapa oleh sebuah Word yang bukan karya mereka sendiri, sebuah Word yang sekaligus memanggil dan memerintah, menjanjikan dan mengadili.

Beberapa klarifikasi diperlukan.

Pertama, Sabda bukan lawan rasionalitas. Sabda bukan izin bagi kesewenang-wenangan. Dalam banyak tradisi, penerimaan pewahyuan disertai disiplin ketat penafsiran, argumentasi, dan pengujian moral *(Nasr 1989; Taylor 1989).* Sabda tidak meniadakan kebutuhan akan argumen, penafsiran, dan bukti. Sabda justru menegaskan bahwa beberapa kebenaran, terutama yang berkaitan dengan telos tertinggi dan martabat yang tak dapat diganggu gugat, tidak disimpulkan dari preferensi manusia atau kontrak sosial, melainkan diterima sebagai sesuatu yang mengikat.

Kedua, Sabda bukan sekadar satu ranah wacana di antara yang lain. Dalam The Cohesive Tetrad, Sabda menempati posisi struktural yang lebih tinggi. Ketika Sabda secara kredibel berbicara tentang norma dan telos, ia tidak hanya menyatakan tindakan apa yang boleh atau dilarang, tetapi juga jenis kehidupan seperti apa yang patut disebut bijaksana atau bodoh, dan tujuan-tujuan mana yang layak diklaim sebagai tujuan seorang manusia. Tanpa sumber seperti ini, institusi cenderung berayun antara proseduralisme tipis dan moralitas tebal yang tidak stabil, yang dibangun dari konsensus yang berubah-ubah. Rujukan yang terus-menerus kepada martabat manusia dalam wacana hukum dan politik dapat dibaca sebagai pengakuan implisit bahwa sesuatu seperti Sabda dibutuhkan, bahkan ketika nama itu tidak digunakan *(Habermas 2008; UNESCO 2021).*

Ketiga, Sabda tidak menafsirkan dirinya sendiri. Sabda selalu diterima melalui sejarah, bahasa, dan komunitas. Berbagai tradisi dan mazhab mengembangkan rumusan yang saling bersaing tentang apa yang dituntut Sabda dalam situasi tertentu. Karena itu, The Cohesive Tetrad tidak meromantisasi Sabda sebagai suara murni yang melompati semua mediasi manusia. Sebaliknya, Sabda ditempatkan di puncak sebuah arsitektur yang mencakup logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment sebagai instrumen pengujian, koreksi, dan pemurnian. Penyalahgunaan pewahyuan, termasuk tafsir yang menindas atau melahirkan kekerasan, dapat dan harus diadili melalui kegagalannya untuk selaras dengan telos dan karakter yang Sabda sendiri nyatakan.

Dari perspektif The Cohesive Tetrad, institusi modern kerap hidup dengan Sabda yang tersembunyi. Mereka merujuk pada martabat tanpa syarat dan hak yang tak dapat dinegosiasikan, mereka berbicara tentang kesalahan yang tak dapat dibenarkan bahkan oleh kehendak mayoritas, tetapi mereka enggan menyebut sumber norma dan telos di luar kesepakatan manusia *(Putnam 2002; Jobin et al. 2019).* Tugas arsitektur ini bukan memaksakan satu tradisi keagamaan ke dalam kehidupan publik, melainkan menjelaskan secara eksplisit ketergantungan tata kelola kebenaran pada sumber yang lebih dalam dari konsensus dan membawa ketergantungan tersebut ke dalam tata kelola yang terdisiplin.

4.3. Logika: instrumen terlatih dan medium bersama

Dalam arsitektur The Cohesive Tetrad, logika memperoleh peran yang sekaligus diagungkan dan dibatasi. Logika diagungkan sebagai *craft* terlatih yang menjernihkan klaim, menguji koherensi, dan membuat perbedaan menjadi terlihat. Logika dibatasi karena ia tidak diizinkan mendefinisikan norma dan telos secara mandiri.

Setidaknya ada tiga fungsi pokok logika.

Pertama, logika adalah instrumen penjernih. Logika memaksa rujukan-rujukan yang kabur kepada Sabda, pengalaman, atau suara hati untuk mengambil bentuk yang dapat diperiksa: proposisi, argumen, model, dan prosedur. Dalam peran ini, logika melindungi Sabda agar tidak diperkecil menjadi slogan dan melindungi Qualia agar tidak disingkirkan sebagai sekadar perasaan. Penjernihan tidak identik dengan reduksi, tetapi tanpa penjernihan, penipuan diri terlalu mudah terjadi.

Kedua, logika adalah instrumen penguji. Logika memeriksa apakah klaim tentang pewahyuan, pengalaman, atau desain institusional koheren secara internal dan apakah premis-premisnya sungguh mendukung kesimpulan yang ditarik. Dalam hukum dan kecerdasan buatan, ini mencakup penelaahan argumen hukum, justifikasi kebijakan, dan model algoritmik. Logika mengungkap ketika bahasa saleh menutupi kontradiksi, ketika niat mulia bertabrakan dengan aturan yang sebenarnya, dan ketika model menghasilkan pola kerugian yang disangkal oleh para perancangnya *(Fuller 1964; O'Neil 2016; Mittelstadt et al. 2016).*

Ketiga, logika adalah medium bersama dalam konteks majemuk. Di masyarakat yang warganya dibentuk oleh tradisi Sabda yang berbeda dan sejarah penderitaan yang berbeda, ruang penalaran publik tidak dapat bergantung pada satu bahasa sakral. Logika menyediakan sebagian tanah bersama. Logika tidak menghapus perbedaan mendalam, tetapi menawarkan tata bahasa di mana perbedaan itu dapat diartikulasikan dan diperdebatkan tanpa segera bersandar pada kekerasan. Dalam pengertian ini, logika bekerja sama dengan cita-cita diskursif dalam teori hukum dan politik yang mengupayakan pembenaran publik lintas pandangan dunia *(Habermas 1996).*

Poin krusialnya adalah bahwa logika tidak menciptakan telos. Logika tidak dapat, sendirian, memberi tahu kita untuk apa manusia diciptakan atau mengapa kerugian tertentu tidak dapat ditoleransi. Logika dapat menunjukkan bahwa beberapa tujuan tidak konsisten atau saling menghancurkan, logika dapat mengungkap bahwa kebijakan tertentu bertentangan dengan prinsip yang telah diumumkan, tetapi logika tidak dapat menganugerahkan nilai intrinsik pada pribadi. Karena itu, dalam The Cohesive Tetrad, logika dibebaskan dari tugas mustahil untuk memikul tujuan terakhir dan dikembalikan kepada tugasnya yang layak: melayani tujuan-tujuan tersebut.

4.4. Qualia: perekaman pengalaman dan umpan balik evaluatif

Qualia, dalam kerangka ini, menamai ranah pengalaman hidup, berwujud, dan komunal. Qualia mencakup rasa aman atau ancaman di suatu lingkungan, suasana kepercayaan atau ketakutan di ruang sidang, martabat atau penghinaan yang dialami mereka yang menjadi objek keputusan algoritmik, dan pola harapan atau keputusasaan jangka panjang yang berkumpul di sekitar institusi. Qualia bukan hanya tentang perasaan individu. Qualia adalah atmosfer tak kasat mata yang dihasilkan sebuah rezim kebenaran dari waktu ke waktu.

Di bawah ideologi logika murni, Qualia cenderung diperlakukan sebagai derau. Pengalaman dianggap penting sejauh dapat diukur dan diagregasi, tetapi tekstur kualitatifnya tidak diakui sebagai ranah kebenaran. Tujuannya adalah mengubah perasaan menjadi titik-titik data yang dapat diproses oleh logika yang sama seperti variabel lainnya. Akibatnya, kepekaan hilang.

Situasi di mana prosedur tampak adil secara formal tetapi menindas secara pengalaman sulit dijelaskan, sehingga sulit pula diperbaiki *(Fricker 2007; Medina 2013).*

Di dalam The Cohesive Tetrad, Qualia memiliki tiga fungsi utama.

Pertama, Qualia berfungsi sebagai medan perekaman. Qualia merekam bagaimana rezim hukum, kebijakan, dan teknologi sungguh dijalani. Kesaksian mereka yang memikul beban terberat, pola trauma atau resiliensi, dan perubahan kepercayaan komunal semuanya menjadi bagian dari rekam kebenaran. Ketika komunitas melaporkan bahwa suatu sistem hukum atau praktik algoritmik secara konsisten menghasilkan rasa takut, penghinaan, atau "ketak-terlihatan", Qualia menandai kemungkinan ketidakselarasan, bahkan bila aturan dasarnya tampak rapi di atas kertas *(O'Neil 2016; Zuboff 2019).*

Kedua, Qualia menyediakan alasan yang tidak sekadar dapat direduksi ke argumen formal. Kisah penyintas tentang bagaimana sebuah proses dirasakan, narasi komunitas tentang bagaimana sebuah platform mengubah relasi sosial, atau deskripsi seorang pasien tentang bagaimana suatu protokol medis mengikis agensi, bukanlah emosi belaka. Semua itu adalah sumber pengetahuan tentang apa yang sedang dilakukan sebuah sistem terhadap pribadi. Pengetahuan berpengalaman seperti ini tidak tak bersalah dari kesalahan, tetapi juga tidak irasional. Pengetahuan itu dapat dan harus ditimbang dalam terang Sabda, logika, dan Mistika.

Ketiga, Qualia menghubungkan Sabda dengan desain institusional. Sabda berbicara tentang belas kasih, keadilan, dan kepedulian terhadap yang rentan. Qualia memperlihatkan apakah institusi yang merujuk pada bahasa tersebut sungguh memanifestasikan kualitas-kualitas itu. Ketika terdapat penyimpangan yang persisten antara komitmen resmi dan pengalaman hidup, Qualia mendesak perubahan. Qualia juga menyediakan medan di mana komunitas belajar mempersepsi dengan lebih tajam, menamai bentuk-bentuk halus dari kerugian, dan menolak narasi yang menormalkan ketidakadilan.

Dengan cara ini, Qualia bertindak sebagai lingkar umpan balik evaluatif yang berkelanjutan. Qualia tidak hanya menanyakan apakah keputusan proseduralnya benar, tetapi juga jenis dunia seperti apa yang sedang diciptakan ketika rezim kebenaran tertentu diterapkan.

4.5. Mistika: pemurnian niat dan kedalaman pencarian

Mistika merujuk pada *Mistika, the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent*. Dalam The Cohesive Tetrad, Mistika memusatkan perhatian pada orientasi hati dan kehendak dalam pencarian kebenaran dan dalam penggunaan otoritas. Mistika mengingatkan bahwa penalaran selalu dibawa oleh agen, dan para agen digerakkan oleh kasih, ketakutan, dan loyalitas yang membentuk apa yang mereka bersedia lihat.

Ranah ini penting karena penggunaan logika dan bukti tidak pernah sepenuhnya mekanis. Dua peneliti dapat bekerja dengan data dan metode yang sama tetapi mencapai kesimpulan yang sangat berbeda karena niat dasar mereka berbeda. Salah satunya mungkin digerakkan oleh keinginan akan status atau kemenangan, yang lain oleh keinginan untuk memahami dan melayani. Pola-pola *motivated reasoning* yang didokumentasikan dalam psikologi merupakan gejala dari lapisan yang lebih dalam ini, di mana kehendak secara halus mengarahkan persepsi dan argumen *(Kunda 1990).*

Mistika menamai sekaligus dimensi diagnostik dan korektif. Sebagai diagnosis, Mistika mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. Mengapa penyelidikan ini dilakukan. Jenis diri dan komunitas seperti apa yang terbentuk melalui praktik penalaran ini. Kasih, ketakutan, dan loyalitas mana yang secara diam-diam mengarahkan cara bukti dipilih, ditangani, dan disajikan. Sebagai koreksi, Mistika menunjuk pada disiplin-disiplin yang dikembangkan berbagai tradisi untuk memurnikan niat: praktik pemeriksaan batin, penelaahan bersama, askese, dan kesediaan rendah hati untuk mendengarkan mereka yang menderita.

Dalam kaitannya dengan hukum dan kecerdasan buatan, Mistika menuntut agar perancang, hakim, dan pembuat kebijakan memeriksa bentuk spiritual dari pekerjaan mereka. Seorang sarjana hukum dapat menyusun argumen yang secara formal tak bercela demi membela kebijakan yang secara halus mengukuhkan penghinaan terhadap kelompok tertentu. Seorang insinyur dapat mengoptimalkan sistem rekomendasi dengan cara yang meningkatkan keterlibatan, tetapi dengan harga memperdalam kecanduan dan polarisasi. Dalam kedua kasus, mungkin tidak ada kesalahan logis yang jelas, tetapi terdapat ketidakselarasan antara niat dan telos yang diwahyukan oleh Sabda. Mistika menempatkan ketidakselarasan semacam itu di dalam wilayah tata kelola kebenaran, bukan sekadar meninggalkannya sebagai urusan moral privat.

4.6. Akhlak dan Intention-Trace Alignment: diagnosis jangka panjang

Akhlak dalam kerangka ini merujuk pada karakter moral yang dapat diamati dari pribadi dan komunitas yang terbentuk dari waktu ke waktu di bawah sebuah rezim kebenaran. Akhlak mencakup sifat-sifat seperti kejujuran, keberanian, belas kasih, dan kerendahan hati intelektual. Intention-Trace Alignment menambahkan satu dimensi lagi. Ia memeriksa derajat keselarasan antara niat epistemik dan jejak epistemik-moral-yakni antara apa yang dikatakan agen sebagai tujuan dalam pencarian pengetahuan dan pola efek nyata yang ditinggalkan praktik mereka di dunia.

Bersama-sama, Akhlak dan Intention-Trace Alignment berfungsi sebagai perangkat diagnosis yang lambat namun kuat. Keduanya kurang terpaku pada keputusan-keputusan terpisah, dan lebih pada trajektori. Dengan keduanya, kita dapat mengajukan pertanyaan seperti: selama bertahun-tahun atau dekade, jenis manusia seperti apa yang dibentuk oleh rezim kebenaran ini. Apakah norma dan telos yang dinyatakan sungguh diwujudkan dalam praktik. Jika terjadi ketidaksesuaian, apakah itu insidental atau justru struktural.

Penekanan diagnostik ini selaras dengan perkembangan dalam epistemologi kebajikan dan studi empiris tentang karakter intelektual, yang menegaskan bahwa disposisi yang stabil seperti kerendahan hati intelektual dan keterbukaan pikiran merupakan pusat bagi penyelidikan yang andal *(Zagzebski 1996; Roberts and Wood 2007; Baehr 2011; Krumrei-Mancuso and Rouse 2016).* The Cohesive Tetrad memperluas perhatian ini melampaui agen individual menuju institusi. The Cohesive Tetrad menanyakan Akhlak seperti apa yang secara statistik didorong atau justru dihambat oleh prosedur hukum tertentu atau arsitektur teknologi tertentu, dan apakah jejak jangka panjang sistem-sistem tersebut selaras dengan niat yang mereka nyatakan.

Jika arsitektur tata kelola kebenaran sehat, kegagalan insidental akan tetap terjadi, tetapi pola kemunafikan yang persisten seharusnya terkoreksi. Sebaliknya, ketika bukti puluhan tahun menunjukkan bahwa prosedur tertentu secara rutin melahirkan penipuan, kekejaman, atau keangkuhan epistemik, Akhlak dan Intention-Trace Alignment memperlakukan hal ini bukan

sebagai kebisingan acak, melainkan sebagai tanda bahwa arsitekturnya sendiri tidak selaras. Jarak antara apa yang diucapkan dan apa yang dijalani tidak akan menyempit sampai susunan dasar ranah-ranahnya diubah.

Fungsi diagnosis ini penting karena menghormati waktu. Banyak kerusakan dari hukum dan teknologi baru tampak setelah pemakaian jangka panjang. Dengan memasukkan karakter dan jejak jangka panjang ke dalam definisi tata kelola kebenaran itu sendiri, The Cohesive Tetrad menolak godaan untuk menilai sistem hanya pada titik keputusan dan mendesak agar kita mengikuti jejak moral yang ditinggalkannya.

4.7. Relasi struktural di dalam The Cohesive Tetrad

Ranah-ranah dalam The Cohesive Tetrad bukan sekadar gagasan yang dikumpulkan secara longgar. Ranah-ranah itu berdiri dalam relasi terstruktur yang penting bagi tata kelola kebenaran.

Pertama, terdapat relasi vertikal otoritas. Sabda berdiri di puncak sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*. Hal ini tidak berarti bahwa setiap klaim pewahyuan secara otomatis benar atau mengikat. Hal ini berarti bahwa, di dalam arsitektur ini, setiap klaim tentang tujuan tertinggi atau martabat yang tak dapat diganggu gugat pada akhirnya diuji oleh kesetiaannya pada Sabda, bukan oleh popularitas atau kegunaan jangka pendek. Tanpa rujukan vertikal ini, bahasa tentang martabat berisiko menyusut menjadi cara halus untuk menggambarkan preferensi.

Kedua, terdapat serangkaian relasi horizontal koreksi timbal balik. Logika, Qualia, dan Mistika saling mempertanyakan dan saling memperhalus. Logika memeriksa apakah tafsir Sabda dan narasi pengalaman koheren dan apakah klaim tentang kemurnian batin konsisten dengan perilaku yang dapat diamati. Qualia memperlihatkan ketika sistem yang secara formal rapi tetap menghasilkan pola kerugian yang bertentangan dengan telos Sabda. Mistika menyingkap bagaimana kesombongan, ketakutan, atau keterikatan idolatris pada kekuasaan dapat mendistorsi penalaran logis maupun pengelolaan pengalaman. Tidak ada ranah yang dibiarkan tanpa pengawasan. Setiap ranah diberi “tetangga” yang mampu mengungkap ekses dan titik butanya.

Akhlak dan Intention-Trace Alignment beroperasi melintasi relasi-relasi ini sebagai audit longitudinal. Keduanya tidak menambahkan ranah isi yang baru, melainkan dimensi temporal. Keduanya menanyakan apakah arsitektur, ketika diwujudkan secara nyata, menghormati klaimnya sendiri dari waktu ke waktu. Dalam pengertian ini, The Cohesive Tetrad bukan hanya peta ranah, tetapi juga rancangan bagi proses interaksi, koreksi, dan penilaian yang terus berlangsung.

4.8. Cara The Cohesive Tetrad menjawab kegagalan logika murni

Kritik sebelumnya terhadap logika murni telah mengidentifikasi sedikitnya empat kerentanan struktural. Arsitektur logika murni tidak dapat memendasarkan norma-normanya sendiri tanpa kepercayaan tersembunyi, tidak mampu mempertahankan evidensialisme keras tanpa runtuh ke dalam skeptisisme, tidak dapat mempertahankan pemisahan ketat fakta-nilai dalam praktik, dan tidak sanggup memberikan penjelasan kokoh tentang martabat manusia. Arsitektur The Cohesive Tetrad berbicara langsung kepada masing-masing titik ini.

Masalah pemendasaran diri dijawab dengan mengakui bahwa logika dan bukti tidak melegitimasi diri sendiri, melainkan bertumpu pada penerimaan Sabda yang mendahului. Komitmen kepada kebenaran dan keyakinan bahwa realitas itu dapat dipahami dipahami sebagai respons terhadap sebuah Word yang memanggil dan memberi mandat bagi penyelidikan. Logika tetap membuka ruang bagi refleksi filosofis tentang norma-normanya sendiri, tetapi refleksi tersebut ditempatkan di dalam cakrawala yang lebih luas.

Batas-batas evidensialisme keras dijawab dengan mengintegrasikan kepercayaan, karakter, dan pengalaman ke dalam struktur rasionalitas. Kepercayaan pada kesaksian dan institusi, Akhlak para agen epistemik, dan Qualia komunitas yang terdampak oleh keputusan diakui sebagai komponen normal dari komitmen yang bertanggung jawab, bukan sebagai penyimpangan yang harus dijelaskan pergi. Bukti tetap menjadi pusat, tetapi apa yang dianggap sebagai bukti diperluas secara terdisiplin.

Keterjeratan fakta dan nilai tidak lagi menjadi hal yang memalukan dan harus disembunyikan, tetapi justru diakui sebagai ciri eksplisit arsitektur. Pencarian kebenaran dipahami selalu sudah bersifat etis, sebab ia dipandu oleh Sabda, dijalankan oleh agen yang Mistika-nya tidak pernah netral, dan dinilai oleh dampaknya terhadap Qualia dan Akhlak komunal. Upaya berpura-pura bahwa penyelidikan bebas nilai diperlakukan sebagai bentuk penipuan diri, bukan sebagai ideal.

Status rapuh martabat diperkuat dengan menempatkannya di bawah Sabda, bukan di bawah konsensus atau utilitas. Martabat menjadi spesifikasi telos, bukan proyeksi preferensi. Pada saat yang sama, klaim martabat tidak kebal dari kritik. Klaim tersebut tetap tunduk pada penelaahan melalui Qualia, Mistika, dan logika, dan keasliannya dilacak melalui Akhlak dan Intention-Trace Alignment. Kombinasi ini memungkinkan institusi berbicara dengan bahasa martabat yang kuat tanpa memberikan kekuasaan tak terkendali kepada otoritas manusia mana pun yang mengklaim berbicara atas nama martabat.

Dalam setiap kasus, solusi yang ditawarkan bukanlah menyingkirkan logika, melainkan melepaskan logika dari tuntutan untuk menjadi segalanya. Ketika logika diposisikan ulang di dalam The Cohesive Tetrad, kekuatannya dapat dimanfaatkan tanpa berlebihan, dan kelemahannya dapat dikenali serta diperbaiki.

4.9. Martabat logika di dalam arsitektur yang setia pada kebenaran

Gambaran yang muncul bukanlah penghinaan terhadap logika. Sebaliknya, The Cohesive Tetrad justru menyelamatkan logika dari mandat yang mustahil dan menganugerahkan peran yang lebih realistis dan lebih terhormat. Logika tidak lagi diminta menyediakan justifikasi terakhir bagi dirinya sendiri, memurnikan penyelidikan dari semua nilai, atau meniupkan isi moral ke dalam konsep martabat yang tidak cocok dengan bingkai naturalistiknya.

Sebaliknya, logika dihormati sebagai *craft* yang menjaga setiap ranah tetap jujur secara intelektual pada level struktur dan inferensi. Logika tetap esensial bagi sains, bagi hukum, dan bagi desain teknologi. Tidak satu pun tafsir Sabda, klaim tentang Qualia, praktik Mistika, atau penilaian tentang Akhlak yang kebal dari penelaahan logis. Logika tetap menuntut koherensi, mengungkap kontradiksi, dan menegaskan bahwa alasan harus diberikan.

Yang berubah adalah bahwa kini logika beroperasi di bawah cakrawala yang didefinisikan ulang. Logika secara eksplisit diarahkan kepada Sabda, terbuka terhadap Qualia, direndahkan oleh Mistika, dan bertanggung jawab kepada diagnosis jangka panjang Akhlak dan Intention-Trace Alignment. Kemuliaan logika yang sejati terletak pada pelayanannya kepada kebenaran yang lebih besar daripada dirinya sendiri, bukan pada berpura-pura menjadi keseluruhan kebenaran.

Dengan demikian, arsitektur The Cohesive Tetrad menawarkan cara bagi institusi untuk tetap rasional sambil mengakui ketergantungannya pada sumber-sumber norma dan telos yang tidak dapat dihasilkan oleh logika semata. Hal ini mempersiapkan landasan bagi bagian-bagian berikutnya dari artikel, yang akan menunjukkan bagaimana arsitektur ini dapat diterapkan pada dua ranah di mana ideologi logika murni sekaligus kuat dan rapuh, yakni rasionalitas hukum dan tata kelola kecerdasan buatan.

5. Rasionalitas Hukum dalam Kerangka Logika Murni dan The Cohesive Tetrad

Hukum merupakan salah satu tempat paling jelas di mana janji dan kegagalan ideologi logika murni menjadi konkret. Pengadilan dan sistem hukum mengklaim bahwa mereka dipandu oleh alasan, bukti, dan prosedur, bukan oleh kehendak sewenang-wenang atau hasrat. Karena itu, rasionalitas hukum adalah lahan uji yang ideal bagi setiap arsitektur tata kelola kebenaran. Jika sebuah arsitektur gagal di sini, ia gagal tepat di titik di mana kerentanan manusia dan kekuasaan institusional paling langsung berjumpa.

Dalam bagian ini, saya terlebih dahulu menggambarkan bagaimana ideologi logika murni membentuk ulang pemikiran dan praktik hukum. Saya kemudian mengidentifikasi titik-titik buta struktural yang muncul ketika rasionalitas hukum dipusatkan pada logika murni. Terakhir, saya merekonstruksi rasionalitas hukum di dalam arsitektur The Cohesive Tetrad, dengan Sabda, logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment masing-masing memainkan peran yang berbeda. Hukum menjadi medan di mana kontras antara dua arsitektur ini dapat diamati, bukan sekadar ditegaskan.

5.1. Hukum di bawah ideologi logika murni

Ketika ideologi logika murni mengakar dalam pemikiran hukum, beberapa kecenderungan muncul secara bersamaan.

Pertama-tama, hukum dibayangkan ulang sebagai sebuah sistem yang otonom. Legitimasi hukum ditempatkan terutama pada koherensi internal dan keteraturan prosedural. Aturan dan preseden ditafsirkan dengan cara yang menjaga konsistensi sistemik. Pelaku hukum belajar memandang hukum sebagai suatu tatanan mandiri yang dapat dibenarkan oleh prinsip-prinsipnya sendiri, dengan rujukan minimal pada sumber eksternal dari norma dan telos. Otonomi ini dipandang rasional karena mengisolasi hukum dari perubahan politik yang sewenang-wenang dan dari rujukan sektarian pada pewahyuan.

Pada saat yang sama, pemisahan antara fakta dan nilai diperkeras. Fakta ditempatkan di ranah pembuktian, sedangkan nilai dikurung di ranah kebijakan atau keyakinan personal. Pengadilan berfokus pada pencarian fakta dan penerapan aturan, sementara pertanyaan yang lebih luas tentang tujuan hukum, bentuk masyarakat yang adil, atau makna martabat diperlakukan sebagai

urusan lembaga legislatif atau suara hati privat. Wawasan moral dan spiritual didorong ke pinggiran atau dibungkus dalam abstraksi-abstraksi yang hati-hati.

Bahasa martabat, hak, dan keadilan tidak lenyap. Sebaliknya, bahasa ini sering dirujuk dalam teks-teks konstitusional, traktat, dan putusan yudisial. Namun di bawah ideologi logika murni, bahasa tersebut cenderung dikodekan ulang sebagai cara canggih untuk berbicara tentang kepentingan dan prosedur. Martabat menjadi label bagi hasil-hasil tertentu setelah fakta, bukan sumber utama norma. Hak berubah menjadi alat untuk menyeimbangkan klaim-klaim yang bersaing, bukan ekspresi dari suatu tatanan yang mengadili negara maupun masyarakat.

Akhirnya, para pelaku di dalam sistem hukum didorong untuk memahami diri mereka terutama sebagai teknisi aturan. Tugas mereka adalah menafsirkan teks, menimbang bukti, dan menerapkan standar dengan cara yang dapat dibela sebagai rasional secara formal. Pengembangan Akhlak, pembentukan karakter, dan jejak moral jangka panjang dari keputusan-keputusan dipandang sebagai urusan privat. Selama hakim dan pengacara menghindari korupsi yang nyata dan mengikuti prosedur yang diterima, pertanyaan yang lebih dalam mengenai jenis manusia seperti apa yang dibentuk oleh sistem hampir tidak pernah diajukan.

Konfigurasi ini memiliki kekuatan. Konfigurasi ini menahan otoritas yang sewenang-wenang, mendorong konsistensi, dan memungkinkan banyak sengketa diselesaikan tanpa konflik langsung atas keyakinan-keyakinan pamungkas *(Fuller 1964; Dworkin 1986; Habermas 1996).* Pada saat yang sama, konfigurasi ini mempersiapkan tanah bagi kegagalan-kegagalan khas. Dengan memusatkan rasionalitas hukum pada logika murni, konfigurasi ini melatih dirinya untuk memperlakukan semua normativitas sebagai turunan, semua pengalaman sebagai sekunder, dan semua pertanyaan tentang telos sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan.

5.2. Titik-titik buta struktural dari rasionalitas hukum yang berpusat pada logika

Ketika rasionalitas hukum terutama dibentuk oleh logika murni, sejumlah titik buta struktural muncul.

Pertama, terdapat kecenderungan menuju absolutisme prosedural. Jika legitimasi hukum didefinisikan hampir sepenuhnya oleh apakah prosedur yang benar telah diikuti, maka ketidakadilan yang dalam dapat dirasionalisasi sebagai dapat diterima sejauh semuanya dilakukan "sesuai buku". Keputusan-keputusan yang menghancurkan kehidupan dapat dipertahankan dengan alasan bahwa pengadilan tidak memiliki pilihan setelah fakta-fakta ditetapkan dan aturan diterapkan dengan benar. Seruan pada belas kasih, ekuitas, atau normativitas yang lebih tinggi dibingkai ulang sebagai undangan berbahaya menuju kesewenang-wenangan. Dalam praktiknya, legalitas dan keadilan secara diam-diam diperlakukan sebagai identik, bahkan ketika perbedaan di antara keduanya jelas.

Kedua, pengalaman mereka yang hidup di bawah hukum dengan mudah terpinggirkan. Proseduralisme cenderung mengakui hanya suara-suara yang sesuai dengan kategori yang sudah mapan dan bentuk-bentuk alat bukti yang diakui. Kesaksian yang tidak selaras dengan skrip yang ada sering dianggap tidak relevan atau tidak dapat diandalkan. Qualia hukum-atmosfer yang diciptakannya dalam kehidupan mereka yang bersentuhan dengannya-jarang diperlakukan sebagai sumber pengetahuan. Sebagaimana ditunjukkan kajian tentang ketidakadilan epistemik, hal ini melahirkan pola-pola di mana kelompok tertentu secara

sistematis tidak dipercaya atau disalahpahami, dan di mana penderitaan mereka tidak tercatat sebagai alasan untuk meninjau kembali sistem itu sendiri *(Fricker 2007; Medina 2013).*

Ketiga, pembentukan moral para pelaku hukum diabaikan. Hakim, jaksa, polisi, dan pengacara memegang kekuasaan yang signifikan atas kehidupan orang lain. Namun di bawah konsepsi yang berpusat pada logika, selama mereka menghindari konflik kepentingan yang jelas dan pelanggaran berat, bentuk batin karakter mereka berada di luar bingkai rasionalitas hukum. Kebajikan seperti kerendahan hati intelektual, keberanian untuk menentang norma yang tidak adil, dan kesediaan mendengar dengan jujur suara-suara yang terpinggirkan diperlakukan sebagai tambahan yang terpuji, bukan sebagai komponen struktural sistem. Karya-karya dalam epistemologi kebajikan menunjukkan bahwa pengabaian ini merusak keandalan penalaran hukum itu sendiri *(Zagzebski 1996; Roberts and Wood 2007; Baehr 2011).*

Keempat, konsep martabat menjadi hampa. Pengadilan merujuk pada martabat manusia untuk membatasi penghukuman, melarang perlakuan yang merendahkan, atau melindungi otonomi. Namun jika martabat tidak ditambatkan dalam Sabda atau sumber norma dan telos yang sepadan, martabat berisiko berubah menjadi perangkat retoris. Dalam kasus-kasus sulit, argumen tentang martabat dapat digunakan oleh kedua belah pihak, dan hasil akhirnya bisa lebih bergantung pada inersia institusional atau tekanan politik daripada pada konsepsi pribadi yang stabil. Seiring waktu, martabat dapat ditafsirkan ulang dengan cara yang mengakomodasi kepentingan dominan alih-alih melindungi mereka yang rentan *(Putnam 2002; MacIntyre 1988).*

Titik-titik buta ini tidak muncul karena para pelaku hukum secara khusus jahat. Titik-titik buta ini berasal dari arsitektur itu sendiri. Ketika logika murni diberi posisi utama dalam rasionalitas hukum, arsitektur ini mempersempit medan tentang apa yang boleh dihitung sebagai alasan, membungkam bagian-bagian pengalaman yang tidak cocok dengan kategorinya, dan meninggalkan sistem tanpa sumber norma dan telos yang sepenuhnya terartikulasikan. Langkah berikutnya adalah mempertimbangkan bagaimana rasionalitas hukum berubah ketika diposisikan ulang di dalam The Cohesive Tetrad.

5.3. Memposisikan ulang rasionalitas hukum di dalam The Cohesive Tetrad

Ketika rasionalitas hukum ditempatkan di dalam arsitektur The Cohesive Tetrad, posisi dan fungsi unsur-unsurnya dikonfigurasi ulang.

Sabda terlebih dahulu menjawab hukum pada level telos. Hukum bukan semata-mata seperangkat aturan untuk mengoordinasikan perilaku. Hukum adalah respons komunal terhadap Sabda, *Revelatory Word* yang menamai keadilan, belas kasih, dan perlindungan terhadap yang rentan sebagai perhatian utama. Sabda mengingatkan para legislator dan hakim bahwa hasil-hasil tertentu tidak dapat diterima, bahkan jika hasil tersebut dapat dibela melalui pembacaan ketat terhadap teks atau preferensi mayoritas. Sabda menempatkan batas pada penghukuman, pada eksploitasi, dan pada perlakuan instrumental terhadap pribadi yang tidak dapat diubah melalui pemungutan suara.

Logika kemudian mengambil perannya sebagai instrumen terdisiplin di dalam cakrawala ini. Logika bertanggung jawab untuk menjernihkan isi norma hukum, menguji koherensi undang-undang dan preseden, serta memastikan bahwa keputusan mengikuti alasan yang dapat diartikulasikan secara publik. Logika melestarikan banyak pencapaian teori hukum modern,

termasuk tuntutan akan transparansi, non-kesewenang-wenangan, dan konsistensi *(Fuller 1964; Dworkin 1986).* Perbedaannya yang krusial adalah bahwa logika tidak lagi mengklaim mendefinisikan keseluruhan rasionalitas hukum. Logika melayani telos yang tidak diciptakannya.

Qualia menjadi register kebenaran hukum yang diakui. Atmosfer di pengadilan, cara korban dan terdakwa mengalami proses peradilan, pola ketakutan atau kepercayaan yang dihasilkan hukum dari waktu ke waktu, diperlakukan sebagai bukti mengenai kualitas moral sistem. Kesaksian tentang penghinaan, eksklusi, atau pemulihan bukan sekadar "perasaan" yang harus dikesampingkan, melainkan sinyal bahwa hukum sedang mendekati atau justru mengkhianati telos yang diakuinya *(Fricker 2007; Medina 2013).* Prosedur yang secara konsisten menghasilkan ketakutan dan kebungkaman di antara kelompok-kelompok rentan menuntut peninjauan struktural, bahkan jika prosedur itu secara formal tak bercela.

Mistika memusatkan perhatian pada niat yang menyertai penggunaan kekuasaan hukum. Mistika menanyakan apakah mereka yang membuat dan menerapkan hukum melakukannya dalam roh pelayanan kepada kebenaran dan keadilan, atau dalam roh perlindungan diri, status, dan kontrol. Di dalam The Cohesive Tetrad, penelaahan cermat atas niat bukan latihan privat. Penelaahan ini adalah bagian dari tata kelola kebenaran itu sendiri. Budaya institusional yang memberi ganjaran pada kemenangan adversarial dengan segala cara, atau yang menormalkan ketidakpedulian terhadap kaum miskin, dikenali sebagai terdistorsikan secara spiritual bahkan ketika mematuhi aturan formal *(Kunda 1990; Habermas 1996).*

Akhlak dan Intention-Trace Alignment menyediakan diagnosis jangka panjang. Keduanya menelaah jenis karakter seperti apa yang dibentuk sistem hukum pada para aparatnya dan jejak moral seperti apa yang ditinggalkannya dalam masyarakat. Jika selama dekade-dekade tertentu suatu tatanan hukum melahirkan pola kejujuran, pengendalian diri, keberanian menghadapi ketidakadilan, dan kesediaan mendengar dengan saksama suara yang lemah, arsitekturnya terkonfirmasi. Jika sistem itu secara konsisten menghasilkan sinisme, kekejaman, dan keangkuhan epistemik, ketidakselarasan antara niat dan jejak mengungkap kegagalan arsitektural, bukan sekadar kelemahan individual *(Zagzebski 1996; Baehr 2011; Krumrei-Mancuso and Rouse 2016).*

Dalam pemposisian ulang ini, rasionalitas hukum tidak menjadi kurang rasional. Rasionalitas hukum justru menjadi lebih utuh, karena beroperasi dengan uraian eksplisit tentang sumber norma dan telosnya, mengakui status epistemik pengalaman, memperhatikan bentuk spiritual dari niat, dan menakar jejak moralnya sendiri dari waktu ke waktu.

5.4. Pola ilustratif: prosedur, belas kasih, dan kerugian struktural

Perbedaan antara dua arsitektur dapat dilihat dalam pola-pola berulang yang dihadapi sistem hukum di banyak yurisdiksi. Tiga pola sudah cukup untuk mengilustrasikan kontras tersebut.

Pola pertama berkaitan dengan hubungan antara prosedur dan belas kasih. Di bawah arsitektur yang berpusat pada logika, para hakim mungkin merasa bahwa satu-satunya tugas sah mereka adalah menerapkan hukum sebagaimana tertulis. Permohonan keringanan hukuman, pendekatan restoratif, atau solusi kreatif yang mempertimbangkan seluruh kehidupan pelaku dipandang dengan kecurigaan. Belas kasih dilihat sebagai potensi ancaman bagi kesetaraan di hadapan hukum. Di bawah The Cohesive Tetrad, telos hukum mencakup bukan hanya

pembalasan dan efek jera, tetapi juga pemulihan. Sabda berbicara tentang keadilan yang tidak "mematahkan buluh yang terkulai", dan Qualia merekam apakah praktik pemidanaan menghasilkan kehidupan yang diperbarui atau eksklusi permanen. Logika tetap diperlukan untuk mencegah keberpihakan sewenang-wenang, tetapi belas kasih tidak lagi menjadi unsur asing. Belas kasih adalah bagian dari tujuan hukum itu sendiri.

Pola kedua berkaitan dengan perlakuan terhadap mereka yang pengalamannya tidak sesuai dengan kategori yang ada. Korban bentuk-bentuk kekerasan tertentu, terutama ketika trauma memengaruhi ingatan dan kesaksian, sering mendapati bahwa prosedur hukum tidak tahu harus berbuat apa terhadap kisah mereka. Logika murni cenderung memperlakukan penyimpangan dari struktur naratif yang diharapkan sebagai tanda ketidakandalan. Sebagaimana ditunjukkan kajian tentang ketidakadilan epistemik, hal ini melahirkan kerugian ganda: luka awal diperparah oleh kegagalan institusional untuk mendengarnya sebagai pengetahuan *(Fricker 2007; Medina 2013).* Di dalam The Cohesive Tetrad, Qualia memberi tempat yang lebih kukuh bagi pengalaman-pengalaman ini. Kesulitannya bukan alasan untuk mengabaikan, melainkan alasan untuk menyempurnakan kategori dan praktik pembuktian, dipandu oleh penegasan Sabda tentang kepedulian pada yang rentan dan oleh perhatian Mistika pada kebenaran, bukan perlindungan diri institusi.

Pola ketiga berkaitan dengan kerugian struktural. Sistem hukum dapat beroperasi dalam waktu lama dengan prosedur yang secara formal adil sambil secara konsisten menghasilkan hasil yang merugikan kelompok tertentu. Undang-undang perumahan, praktik kepolisian, dan kerangka pemidanaan mungkin semuanya dapat dipertahankan secara individual, namun secara kolektif membentuk pola eksklusi yang tampak dalam disparitas statistik dan dalam kenyataan hidup komunitas. Di bawah logika murni, pola-pola ini dapat dianggap sebagai efek samping atau sebagai hasil faktor non-hukum. Di bawah The Cohesive Tetrad, Akhlak dan Intention-Trace Alignment memperlakukan pola-pola ini sebagai bagian dari rekam kebenaran. Jika jejak hukum secara persisten tidak selaras dengan niatnya yang diaku untuk menjamin keadilan bagi semua, yang diperlukan adalah reformasi, bukan sekadar penyesuaian retorika *(O'Neil 2016; Zuboff 2019).*

Pola-pola ini menunjukkan bahwa pergeseran yang diusulkan oleh The Cohesive Tetrad bukan sekadar konseptual. Pergeseran ini mengubah apa yang dianggap sebagai masalah hukum, jenis bukti apa yang diterima, bagaimana pemeriksaan diri institusional dijalankan, dan pertanyaan mana yang dianggap sah. Hukum menjadi ruang di mana Sabda, logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment benar-benar berinteraksi, bukan bidang yang diatur oleh logika semata.

5.5. Hukum sebagai lahan uji bagi tata kelola kebenaran

Hukum bukan hanya salah satu aplikasi di antara yang lain. Hukum adalah lahan uji bagi setiap usulan serius tentang tata kelola kebenaran. Di dalam hukum, klaim abstrak mengenai rasionalitas, martabat, dan normativitas dipaksa bersentuhan dengan kasus-kasus konkret. Seseorang harus dinyatakan bersalah atau dibebaskan, diberi ganti rugi atau ditolak, dilindungi atau dibiarkan terekspos. Keputusan tidak dapat ditunda tanpa batas. Orang tidak bisa dibiarkan tanpa kepastian.

Jika ideologi logika murni gagal di sini, kegagalannya tampak dalam pola absolutisme prosedural, penghapusan pengalaman, deformasi moral para pelaku hukum, dan kehampaan

dalam wacana martabat. Ini bukan efek samping kebetulan. Ini adalah gejala dari arsitektur yang telah mencoba menjadikan logika memikul beban yang lebih berat daripada yang dapat ditanggungnya.

Jika arsitektur The Cohesive Tetrad berhasil di sini, keberhasilannya juga akan tampak. Pengadilan akan tetap menalar dengan cermat melalui teks dan preseden, tetapi melakukannya secara terbuka di bawah telos yang tidak mereka ciptakan sendiri. Pengadilan akan mendengarkan dengan lebih dalam pengalaman mereka yang paling terdampak. Pengadilan akan menumbuhkan Akhlak pada para aparatnya dan menundukkan sejarah institusionalnya sendiri pada analisis Intention-Trace. Hukum akan dikenali bukan hanya sebagai instrumen keteraturan, tetapi sebagai citra kasar namun otentik dari keadilan yang berakar pada Sabda.

Untuk kepentingan artikel ini, peran hukum dengan demikian bersifat ganda. Hukum menyediakan arena konkret di mana kontras antara logika murni dan The Cohesive Tetrad dapat diamati. Hukum juga berfungsi sebagai medan pembuktian untuk menilai apakah suatu arsitektur tata kelola kebenaran dapat menopang institusi yang sekaligus rasional dan manusiawi. Dalam bagian berikutnya, lahan uji ini diperluas ke domain kecerdasan buatan yang berkembang pesat, di mana godaan dan bahaya ideologi logika murni menjadi lebih intens dan di mana kebutuhan akan arsitektur alternatif seperti The Cohesive Tetrad menjadi semakin mendesak.

6. Kecerdasan Buatan dalam Kerangka Logika Murni dan The Cohesive Tetrad

Jika hukum adalah teater klasik bagi rasionalitas, kecerdasan buatan adalah panggungnya yang paling baru dan paling ambisius. Dalam kecerdasan buatan, ideal logika murni muncul dalam bentuk teknologi. Sistem dirancang untuk menyerap data, menerapkan kaidah formal atau parameter yang dipelajari, dan menghasilkan keluaran yang dipresentasikan sebagai rasional, objektif, dan bebas dari bias manusia. Janji yang ditawarkan sudah akrab: jika lebih banyak keputusan didelegasikan kepada mesin yang terdisiplin secara logis, maka kesalahan, ketidakkonsistenan, dan prasangka dapat dikurangi.

Namun pertanyaan yang sama yang mengganggu logika murni dalam filsafat dan hukum muncul kembali-sering dalam bentuk yang lebih tajam-dalam kecerdasan buatan. Apa yang menjadi dasar norma yang membimbing sistem ini. Siapa yang menentukan tujuan yang mereka optimalkan. Bagaimana martabat manusia dan telos direpresentasikan, jika direpresentasikan sama sekali. Bagian ini menerapkan arsitektur The Cohesive Tetrad pada kecerdasan buatan: pertama dengan menelusuri bagaimana ideologi logika murni membentuk kecerdasan buatan, kemudian dengan menyingkap ketegangan internalnya, dan akhirnya dengan menguraikan bagaimana tata kelola kecerdasan buatan dapat terlihat ketika diatur ulang di bawah Sabda, Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment.

6.1. Kecerdasan buatan sebagai mimpi teknologi logika murni

Banyak sistem kecerdasan buatan kontemporer dibangun di atas asumsi yang sangat selaras dengan ideologi logika murni. Detail teknis algoritme beragam, tetapi gambaran dasarnya tetap mengejutkan konsisten.

Data diperlakukan sebagai sumber utama kebenaran faktual. Semakin banyak data yang dapat dihimpun suatu sistem, semakin akurat representasinya tentang dunia diasumsikan. Model

diperlakukan sebagai mekanisme rasional yang mentransformasikan masukan ke keluaran melalui relasi matematis yang ditentukan. Evaluasi berfokus pada kinerja yang terukur: akurasi, fungsi kerugian, tingkat kesalahan, dan metrik sejenis.

Norma dan nilai, ketika diakui, sering direpresentasikan sebagai batasan atas optimisasi atau sebagai suku tambahan dalam fungsi objektif. Keadilan, misalnya, dapat dikodekan sebagai penalti atas disparitas tertentu antar kelompok. Privasi dapat dimasukkan sebagai syarat bahwa data tertentu tidak boleh digunakan. Kerugian dapat ditangani melalui filter pasca-proses yang memblokir atau menyesuaikan keluaran tertentu. Pedoman etika kemudian ditafsirkan sebagai rangkaian batasan di sekitar inti yang pada dasarnya bersifat teknis *(Mittelstadt et al. 2016; Floridi dan Cowls 2019; Jobin et al. 2019).*

Dalam konfigurasi ini, kecerdasan buatan tampak sebagai perwujudan logika murni dalam kode. Sistem beroperasi menurut kaidah yang transparan bagi para perancangnya, atau setidaknya bagi mereka yang memahami modelnya. Pelaku manusia diajak untuk mempercayai sistem-sistem tersebut karena sistem dianggap konsisten, dapat diskalakan, dan bebas dari fluktuasi subjektif yang mengganggu penilaian manusia.

Bahasa yang digunakan untuk mempromosikan kecerdasan buatan kerap memperkuat citra ini. Sistem digambarkan sebagai netral, berbasis bukti, dan rasional. Pengawasan manusia diposisikan sebagai jaring pengaman, tetapi daya tarik utamanya terletak pada janji pengambilan keputusan yang lebih logis daripada intuisi manusia. Mimpi teknologi logika murni dengan demikian berubah menjadi proyek sosial dan ekonomi.

6.2. Ketegangan internal dalam kecerdasan buatan yang berpusat pada logika

Ketika kecerdasan buatan dibentuk oleh ideologi logika murni, sejumlah ketegangan muncul yang mencerminkan, mempertajam, dan memperluas masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Pertama, terdapat ketergantungan tersembunyi pada norma dan telos yang tidak dapat didefinisikan oleh sistem itu sendiri. Setiap model kecerdasan buatan dilatih untuk mengoptimalkan sesuatu: prediksi, klasifikasi, pemeringkatan, atau ganjaran. Pemilihan fungsi objektif tidak ditentukan oleh data. Pemilihan itu adalah keputusan para perancang dan institusi. Tujuan sempit seperti tingkat klik, waktu di platform, atau laba jangka pendek mungkin nyaman secara matematis, tetapi tidak mencerminkan untuk apa manusia diciptakan. Ketika sistem mengoptimalkan proksi tersebut tanpa merujuk pada telos yang lebih tinggi, sistem dapat sangat rasional dalam bingkainya yang tertutup namun sangat destruktif dalam istilah kemanusiaan *(O'Neil 2016; Zuboff 2019).*

Kedua, pemisahan antara fakta dan nilai runtuh dalam praktik. Data yang digunakan untuk melatih sistem kecerdasan buatan memantulkan sejarah, institusi, dan prasangka manusia. Label dan kategori sarat dengan penilaian sebelumnya. Keputusan tentang kesalahan mana yang lebih dapat ditoleransi, trade-off mana yang dapat diterima, dan kerugian mana yang cukup serius untuk dicegah, semuanya sarat nilai. Namun di bawah ideologi logika murni, ada tekanan untuk berbicara seolah-olah model hanya belajar dari dunia sebagaimana adanya, tanpa komitmen normatif. Padahal, setiap pilihan himpunan data, label, dan metrik kinerja sudah mengekspresikan pandangan tentang kesalahan siapa yang penting dan penderitaan siapa yang diperhitungkan.

Ketiga, bahasa martabat sering dikutip tetapi tidak ditambatkan. Kerangka etika kecerdasan buatan kerap berbicara tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat, otonomi, dan non-diskriminasi. Namun jika arsitektur kecerdasan buatan didefinisikan sepenuhnya dalam bingkai naturalistik dan berpusat pada logika, komitmen-komitmen ini tetap menjadi ornament eksternal. Tidak ada ruang batin di dalam sistem di mana keniscayaan pribadi secara struktural diakui. Dalam skenario terbaik, martabat didekati melalui batasan dan penalti. Dalam skenario terburuk, martabat diam-diam disubordinasikan pada kinerja dan efisiensi ketika trade-off menjadi sulit *(Jobin et al. 2019; OECD 2019; UNESCO 2021).*

Keempat, niat mereka yang merancang dan menerapkan kecerdasan buatan sering dikeluarkan dari deskripsi formal. *Model card*, laporan teknis, dan dokumentasi berbicara panjang lebar tentang data, arsitektur, dan pelatihan, tetapi jarang tentang cinta dan ketakutan yang menggerakkan pekerjaan tersebut. Insentif ekonomi, tekanan institusional, dan ambisi personal diperlakukan sebagai latar belakang, padahal faktor-faktor ini sangat memengaruhi sistem seperti apa yang dibangun, kerugian mana yang ditoleransi, dan komunitas mana yang menanggung risiko *(Kunda 1990; O'Neil 2016).*

Ketegangan-ketegangan ini bukan berarti kecerdasan buatan secara inheren korup atau bahwa logika dalam kode selalu berbahaya. Ketegangan ini menunjukkan bahwa ketika kecerdasan buatan dibangun dan diatur di bawah ideologi logika murni, kecerdasan buatan mewarisi kelemahan struktural yang sama: tuntutan agar logika menyediakan apa yang hanya dapat ditopang oleh Sabda, kebutaan terhadap keterjalinan fakta dan nilai, dan pegangan yang rapuh pada martabat.

6.3. Membingkai ulang kecerdasan buatan di dalam The Cohesive Tetrad

Ketika kecerdasan buatan ditempatkan di dalam arsitektur The Cohesive Tetrad, gambaran yang muncul berubah. Kecerdasan buatan tetap menjadi alat yang kuat, tetapi tidak lagi menjadi penguasa sunyi atas rasionalitas. Kecerdasan buatan menjadi salah satu instrumen dalam tugas tata kelola kebenaran.

Dari sudut pandang Sabda, sistem kecerdasan buatan bukan artefak netral. Sistem-sistem tersebut merupakan bagian dari panggilan manusia yang lebih luas untuk mencari kebenaran, menegakkan keadilan, dan melindungi yang rentan. Sabda sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos* berbicara kepada kecerdasan buatan setidaknya dalam tiga cara.

Sabda mengingatkan para perancang dan institusi bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai titik data, sumber daya, atau objek prediksi. Sabda menegaskan bahwa beberapa bentuk pengambilan keputusan otomatis adalah tidak sah, apa pun tingkat efisiensinya, karena bentuk-bentuk itu melanggar martabat pribadi sebagai pembawa telos yang lebih tinggi. Sabda menetapkan batas luar terhadap apa yang boleh dioptimalkan, bahkan ketika optimisasi tampak sepenuhnya mungkin secara logis.

Logika kemudian mengambil perannya sebagai instrumen di dalam cakrawala ini. Dalam kecerdasan buatan, hal ini berarti merancang model dengan kejelasan tentang asumsi, batasan, dan ranah validitasnya. Hal ini mencakup penelaahan struktur inferensial algoritme, identifikasi sumber bias dan ketidakstabilan, serta pemastian bahwa sifat-sifat formal selaras dengan nilai-nilai yang diperintahkan oleh Sabda *(Mittelstadt et al. 2016).* Logika menjadi

keterampilan untuk mengungkap secara eksplisit bagaimana sistem bekerja, bukan otoritas yang memutuskan untuk apa sistem itu seharusnya dipakai.

Qualia masuk sebagai domain yang merekam bagaimana sistem kecerdasan buatan sungguh-sungguh dialami. Qualia mencakup pengalaman dinilai, direkomendasikan, diprofilkan, atau ditolak oleh sistem yang tampak jauh dan buram. Qualia mencatat dampak keputusan otomatis terhadap kepercayaan, kohesi sosial, eksklusi, dan rasa takut. Pengalaman-pengalaman ini bukan sekadar anekdot. Pengalaman ini merupakan bagian dari basis evidensial untuk menilai apakah tata kelola kecerdasan buatan selaras dengan telos yang dinyatakannya *(O'Neil 2016; Zuboff 2019).*

Mistika memperhatikan niat di balik kecerdasan buatan. Mistika menanyakan mengapa proyek tertentu didanai sementara yang lain diabaikan. Mistika menanyakan apakah pengembangan kecerdasan buatan dipandu oleh kerendahan hati dan pelayanan, atau oleh keinginan akan dominasi, keuntungan, dan kontrol. Mistika mengakui bahwa keterampilan teknis yang sama dapat menopang lintasan spiritual yang sangat berbeda: satu lintasan menuju respons yang lebih dalam terhadap Sabda, dan lintasan lain menuju pemujaan pada kemampuan dan kekuasaan.

Akhlak dan Intention-Trace Alignment kemudian memberikan evaluasi jangka panjang atas rezim kecerdasan buatan. Dari waktu ke waktu, jenis karakter seperti apa yang berkembang di institusi yang sangat bergantung pada kecerdasan buatan. Apakah institusi-institusi tersebut menunjukkan kepedulian yang makin besar terhadap yang rentan, transparansi, dan akuntabilitas. Atau justru menjadi lebih buram, semakin abai terhadap kerusakan kolateral, dan semakin nyaman memperlakukan pribadi sebagai data. Jarak antara prinsip yang dideklarasikan dan jejak yang dapat diamati kembali menjadi diagnosis utama tentang apakah tata kelola kecerdasan buatan itu benar atau tidak.

6.4. Implikasi praktis: tujuan, batasan, dan pengawasan

Pembingkaian ulang kecerdasan buatan di dalam The Cohesive Tetrad membawa konsekuensi praktis bagi cara sistem dikonsepsikan, dibangun, dan diatur. Beberapa area memperlihatkan kontras yang sangat tajam dengan ideologi logika murni.

Pertama, dalam pendefinisian tujuan. Di bawah pandangan yang berpusat pada logika, para perancang sering memulai dari apa yang secara teknis layak dan menarik secara ekonomi. Tujuan kemudian didefinisikan dalam istilah efisiensi atau daya prediksi. Di dalam The Cohesive Tetrad, tujuan harus disaring melalui Sabda dan Qualia sebelum diformalkan. Sebagian tujuan, seperti memaksimalkan keterlibatan tanpa mengindahkan kerusakan psikologis, ditolak sejak awal. Tujuan lain diterima hanya jika dapat ditanamkan di dalam telos yang lebih luas, yang memprioritaskan keberlangsungan hidup yang manusiawi, bukan metrik semata.

Kedua, dalam perancangan batasan. Logika murni cenderung memperlakukan batasan sebagai tambahan eksternal yang dipaksakan oleh regulasi atau tekanan publik. The Cohesive Tetrad memperlakukan batasan tertentu sebagai unsur intrinsik dari arsitektur yang benar. Batasan yang melindungi martabat, menjaga agensi manusia yang bermakna, dan mencegah bentuk-bentuk tertentu dari pengawasan atau pemprofilan bukan aksesoris opsional. Batasan ini

merupakan bagian dari struktur yang membuat kecerdasan buatan tetap selaras dengan telos manusia *(Floridi dan Cowls 2019; OECD 2019; UNESCO 2021).*

Ketiga, dalam pengorganisasian pengawasan. Di bawah logika murni, pengawasan sering dirumuskan sepenuhnya dalam istilah teknis: audit bias, uji ketahanan, verifikasi kinerja. Semua ini perlu, tetapi tidak cukup. Di dalam The Cohesive Tetrad, pengawasan juga harus memeriksa niat dan jejak. Pengawasan harus menanyakan siapa yang diuntungkan oleh sistem, suara siapa yang diikutkan atau dikeluarkan dalam perancangannya, dan apakah dampak jangka panjang terhadap Akhlak konsisten dengan tujuan yang dideklarasikan. Karena itu, dewan evaluasi, komite etika, dan badan regulator diharapkan tidak hanya berisi pakar teknis, tetapi juga komunitas yang terdampak oleh sistem dan pribadi-pribadi yang dibentuk oleh tradisi penelaahan moral dan spiritual.

Keempat, dalam status penolakan. Rezim yang berpusat pada logika cenderung mengasumsikan bahwa apabila suatu sistem dapat dibangun dan menunjukkan kinerja tinggi, maka beban pembuktian ada pada pihak yang ingin membatasinya atau menundanya. Rezim yang dibentuk oleh The Cohesive Tetrad membalik praduga tersebut dalam domain tertentu. Untuk beberapa aplikasi-misalnya keputusan otomatis yang sangat memengaruhi hidup, kebebasan, atau inti identitas personal-beban pembuktian berada pada pihak yang ingin menyerahkan kekuasaan kepada mesin. Sabda dan Qualia dapat bersama-sama menunjukkan bahwa kapasitas tertentu harus tetap berada di tangan agen manusia yang memikul pertanggungjawaban langsung, sekalipun mesin pada prinsipnya dapat melaksanakan tugas itu dengan lebih murah atau lebih konsisten.

Implikasi-implikasi ini bukanlah cetak biru teknis. Implikasi ini adalah batasan dan prioritas arsitektural. Implikasi ini menyatakan bahwa tata kelola kecerdasan buatan harus dibangun sejak awal dengan mempertimbangkan Sabda, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment, bukan ditambahkan belakangan sebagai hiasan di sekeliling inti logika murni.

6.5. Kecerdasan buatan sebagai penguat arsitektur yang sudah ada

Pada akhirnya, kecerdasan buatan menguatkan arsitektur tata kelola kebenaran yang sudah ada dalam suatu masyarakat. Jika rezim yang dominan dibentuk oleh ideologi logika murni, kecerdasan buatan akan cenderung memperdalam rezim tersebut. Kecerdasan buatan akan memperluas jangkauan optimisasi sempit, memantapkan pemisahan fakta dan nilai, dan mempercepat erosi martabat yang substantif.

Jika rezim yang dominan mulai mengadopsi arsitektur The Cohesive Tetrad, kecerdasan buatan dapat diarahkan dan dibatasi sedemikian rupa sehingga mendukung, bukan merusak, integritas kebenaran. Sistem tetap akan mengoptimalkan, mengklasifikasikan, dan memprediksi, tetapi melakukannya di bawah telos yang tidak mereka ciptakan sendiri, dengan perhatian pada pengalaman hidup, niat yang dimurnikan, dan jejak moral jangka panjang.

Pemahaman ini memperkuat tesis utama artikel ini. Konflik yang sesungguhnya bukan antara manusia dan mesin, dan bukan pula antara tradisi dan teknologi. Konflik tersebut adalah antara arsitektur-arsitektur kebenaran yang berbeda. Logika murni, ketika diberi kedaulatan, menempatkan rasionalitas dalam posisi berkonflik dengan sumber-sumber normativitas dan telos yang justru dibutuhkannya. The Cohesive Tetrad mengajukan tatanan lain, di mana Sabda

tetap utama dan logika-dalam bentuk yang terkode maupun yang tidak terkode-dipulihkan ke tempatnya yang benar sebagai pelayan kuat bagi panggilan yang lebih tinggi.

7. Keberatan dan Tanggapan

Setiap proposal yang memulihkan Sabda ke peran struktural yang utama dalam tata kelola kebenaran akan memicu keberatan-keberatan serius. Ideologi logika murni tidak muncul dari ruang kosong. Ia tumbuh, antara lain, dari pelajaran pahit tentang konflik keagamaan, penyalahgunaan otoriter atas wahyu, dan rapuhnya perdamaian sosial. Jika The Cohesive Tetrad hendak diperhitungkan secara serius dalam forum akademik yang peka terhadap logika, ia harus berhadapan langsung dengan pelajaran-pelajaran tersebut.

Dalam bagian ini saya membahas lima rumpun keberatan yang secara alami muncul ketika Sabda ditempatkan di pusat sebuah arsitektur yang tetap mengaku menghormati rasionalitas:

1. Keberatan pluralisme.
2. Keberatan nalar publik (*public reason*).
3. Keberatan otoritarianisme.
4. Keberatan "Sabda yang mana" dan relativisme.
5. Keberatan instrumentalisasi.

Setiap keberatan menyentuh sebuah kerentanan yang nyata. Tidak satu pun dapat disingkirkan hanya dengan mengajukan otoritas. Tugasnya adalah menunjukkan bahwa arsitektur The Cohesive Tetrad memiliki sumber daya internal untuk merespons secara masuk akal dan meyakinkan, bukan hanya bagi mereka yang sudah berbagi komitmen terdalamnya, tetapi juga bagi mereka yang peduli pada hukum, kecerdasan buatan, dan martabat manusia dalam masyarakat majemuk.

7.1. Keberatan pluralisme

Keberatan pertama berangkat dari fakta sosiologis dan politis. Masyarakat kontemporer beragam secara religius dan moral. Warga dibentuk oleh banyak tradisi, termasuk tradisi yang secara eksplisit sekuler. Dalam konteks ini, klaim bahwa Sabda, *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, harus memiliki primasi struktural dalam arsitektur publik kebenaran, bagi sebagian orang tampak sebagai resep bagi dominasi yang terbarukan. Jika Sabda milik satu komunitas diberi prioritas, bukankah itu sekadar memasang kembali masalah yang justru hendak diatasi oleh The Cohesive Tetrad: berkuasanya keyakinan terdalam satu kelompok atas kelompok lain.

Arsitektur The Cohesive Tetrad menawarkan tanggapan berlapis.

Pertama, ia membedakan klaim struktural dan klaim substantif. Klaim struktural menyatakan bahwa suatu bentuk Sabda, suatu pengertian bahwa norm dan telos itu diterima, bukan diproduksi, tidak terhindarkan dalam setiap rezim yang benar-benar memandang serius martabat manusia. Bahkan kerangka yang sangat sekuler sekalipun, ketika memperlakukan martabat dan hak sebagai tanpa syarat, dalam praktik merujuk pada suatu otoritas yang melampaui preferensi dan kuasa yang berubah-ubah, meskipun enggan menamainya sebagai Sabda *(Putnam, 2002; Habermas, 1996; UNESCO, 2021)*. Klaim substantif, sebaliknya, menyangkut tafsir konkret mana atas Sabda yang seharusnya menuntun suatu komunitas

tertentu. Arsitektur ini bersikeras bahwa klaim pertama dapat dipertahankan tanpa harus terlalu cepat memutuskan klaim kedua.

Kedua, arsitektur ini memberi logika peran yang tidak sepele dalam memediasi klaim-klaim yang saling bersaing. Tradisi yang berbeda mengajukan konsepsi norm dan telos yang berbeda. Fakta bahwa tradisi itu merujuk kepada Sabda tidak membebaskannya dari telaah rasional. Logika memeriksa koherensi internal, kompatibilitas dengan aksioma martabat manusia minimal, serta konsistensi antara telos yang diakui dan jejak yang teramati. Tradisi yang secara sistematis merusak martabat yang mereka sendiri kumandangkan, atau yang tidak mampu menjelaskan norma-normanya tanpa kontradiksi, menunjukkan diri sebagai kandidat tata kelola kebenaran yang tidak stabil.

Ketiga, Qualia dan Akhlak memperkenalkan uji empiris dan moral jangka panjang. Komunitas yang hidup di bawah tafsir Sabda yang berbeda menghasilkan suasana batin, pola luka dan pemulihan, serta trajektori karakter yang berbeda. Buah-buah jangka panjang ini bukan indikator yang tak mungkin keliru, tetapi merupakan bagian dari evidensi tentang tafsir mana yang membawa kehidupan dan tafsir mana yang justru memperkuat dominasi dan penipuan diri *(Fricker, 2007; Medina, 2013; Zagzebski, 1996; Baehr, 2011)*. Pluralisme tidak diselesaikan hanya lewat perbandingan abstrak, tetapi melalui evaluasi komparatif buah jangka panjang.

Keempat, The Cohesive Tetrad tidak mengharuskan semua warga secara sadar menganut teologi Sabda yang sama tebal. Kita dapat membedakan antara arsitektur lembaga dan kehidupan batin pribadi. Pada tingkat kelembagaan, Sabda dapat membentuk batas konstitusional dan kerangka hak asasi manusia dengan cara yang kompatibel dengan tumpang-tindih keyakinan etis, bahkan di antara mereka yang tidak berbagi narasi religius yang sama *(Habermas, 1996)*. Pada tingkat pribadi, warga dapat terus menafsirkan batas-batas tersebut melalui tradisi dan alasan mereka masing-masing. Logika berperan penting dalam mengenali dan menstabilkan zona-zona tumpang tindih ini.

Keberatan pluralisme, dengan demikian, menyingkap sebuah ketegangan yang nyata, tetapi tidak fatal. Keberatan ini menunjukkan bahwa arsitektur harus mengakui pluralisme dan menahan diri dari triumfalisme. Namun keberatan ini tidak menunjukkan bahwa kerangka yang berpusat pada logika murni, yang menyembunyikan ketergantungannya pada fragmen Sabda yang tak diakui, lebih jujur atau lebih stabil.

*7.2. Keberatan nalar publik (*public reason*)*

Keberatan kedua menyangkut keteraksesan publik. Doktrin nalar publik modern berpendapat bahwa dalam masyarakat yang beragam, justifikasi politis seharusnya berlandaskan alasan yang pada prinsipnya dapat diterima semua warga, terlepas dari doktrin komprehensif mereka. Rujukan kepada wahyu sering diperlakukan sebagai sesuatu yang bermakna secara privat, tetapi tidak dapat diterima di ruang publik. Dari sudut pandang ini, The Cohesive Tetrad tampak bermasalah. Jika Sabda memegang primasi struktural, bukankah itu melanggar tuntutan bahwa warga harus dapat membenarkan hukum yang koersif dalam istilah yang dapat dibagikan dengan para tetangga mereka.

Di sini penting untuk membedakan beberapa lapisan.

Pada lapisan terdalam, setiap doktrin komprehensif, termasuk liberalisme sekuler, berpijak pada komitmen yang tidak dapat diturunkan dari premis netral. Keyakinan tentang kesetaraan nilai moral semua orang, prioritas kebebasan, atau keharusan justifikasi publik, semuanya adalah tesis etis yang tidak dapat ditegakkan oleh logika dan evidensi empiris semata *(Habermas, 1996; Putnam, 2002)*. Klaim bahwa warga harus mampu membenarkan hukum satu kepada yang lain dalam istilah bersama sudah merupakan komitmen normatif, bukan hasil murni dari rasio.

Namun pada tingkat praktik kelembagaan, tetap penting bahwa hukum koersif dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka yang tidak berbagi teologi eksplisit tentang Sabda. The Cohesive Tetrad dapat mengakomodasi hal ini dengan pendekatan dua tingkat terhadap nalar publik.

Pada tingkat fondasional, para sarjana, hakim, dan pembuat kebijakan bersikap eksplisit tentang komitmen terdalam yang membentuk pemahaman mereka tentang manusia dan batas-batas ultimat, termasuk ketergantungan mereka pada Sabda sebagai *the authoritative source of norm and telos*. Komitmen ini diartikulasikan dan dipertahankan secara terbuka, tanpa berpura-pura netral.

Pada tingkat operasional, ketika hukum dan kebijakan diperdebatkan serta diterapkan, alasan yang diajukan menggunakan istilah yang dapat diakses lintas tradisi, sepanjang alasan itu konsisten dengan komitmen yang lebih dalam dan tidak menyelundupkan kepentingan yang bahkan tidak dapat dibenarkan oleh standarnya sendiri. Argumen tentang kejahatan penyiksaan, ketidakbolehan perlakuan yang merendahkan martabat, atau perlunya melindungi kelompok rentan, dapat disusun dalam bahasa martabat dan kerugian yang dapat dipahami oleh para pelaku dari berbagai tradisi, sekalipun teologi akhir mereka berbeda *(Habermas, 1996; UNESCO, 2021)*.

Dengan demikian, tuntutan nalar publik bukan lagi larangan terhadap Sabda, melainkan disiplin penerjemahan dan kerendahan hati. Tuntutan ini mensyaratkan agar mereka yang bertindak dari Sabda bersedia menjelaskan dan membela usulannya dengan cara yang dapat diikuti dan digugat pihak lain. Logika murni tidak memiliki monopoli atas keteraksesan publik. Yang penting adalah apakah alasan yang diajukan dapat dipahami, bukan apakah alasan itu berakar pada metafisika yang diklaim netral.

7.3. Keberatan otoritarianisme

Keberatan ketiga memperingatkan bahwa arsitektur apa pun yang memberi primasi kepada Sabda berisiko tergelincir ke otoritarianisme. Sejarah menyimpan banyak contoh otoritas keagamaan yang mengklaim berbicara atas nama wahyu, lalu menggunakan klaim itu untuk membungkam oposisi, membenarkan kekerasan, dan melindungi diri dari akuntabilitas. Menempatkan Sabda di pusat tata kelola kebenaran dapat tampak bagi banyak orang sebagai cara yang lebih canggih untuk membangun teokrasi.

Bahaya ini nyata. The Cohesive Tetrad tidak menafikan rekam jejak penyalahgunaan tersebut. Justru sebaliknya, karena wahyu dapat disalahgunakan, wahyu perlu ditempatkan di dalam sebuah arsitektur yang memperbanyak mekanisme pengawasan, bukan menghapusnya.

Pertama, Sabda dalam kerangka ini tidak memvalidasi dirinya sendiri pada tingkat tafsir manusiawi. Bahwa Sabda adalah *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos* tidak berarti setiap klaim kelompok bahwa merekalah wakil Sabda otomatis benar. Tafsir harus diuji oleh logika untuk koherensi, oleh aksioma martabat manusia minimal untuk kompatibilitas, dan oleh buah jangka panjangnya untuk integritas. Sebuah rezim yang mengklaim bertindak atas nama Sabda tetapi secara sistematis merendahkan pribadi, gagal dalam uji ini.

Kedua, Qualia berfungsi sebagai alarm publik. Jika rezim yang mengklaim bertindak atas nama Sabda menghasilkan ketakutan, penghinaan, dan keheningan yang luas di tengah orang kebanyakan, pengalaman-pengalaman tersebut merupakan evidensi yang relevan. Itu bukan sekadar reaksi emosional, tetapi indikasi bahwa cara Sabda ditafsirkan dan dilembagakan mungkin telah menyimpang. Qualia menghimpun kesaksian ini dan membawanya ke dalam medan penilaian *(Fricker, 2007; Medina, 2013).*

Ketiga, Mistika bersikeras pada penelaahan niat. Pemimpin yang mengajukan klaim atas nama Sabda tidak diberi praduga kemurnian secara otomatis. Motif, pola hidup, dan respons mereka terhadap kritik ikut diperiksa. Seruan atas wahyu yang dikombinasikan dengan pola pengagungan diri yang konsisten, penghinaan terhadap yang lemah, dan penolakan terhadap koreksi, dikenali sebagai bentuk keteraturan spiritual yang menyimpang. The Cohesive Tetrad mengembalikan motif ke ranah tata kelola, bukan dibiarkan sebagai urusan privat.

Keempat, Akhlak dan Intention-Trace Alignment mengalihkan klaim ke evaluasi jangka panjang. Tidak cukup bagi sebuah rezim untuk menyatakan prinsip luhur. Sejarahnya harus menunjukkan pertumbuhan dalam kebajikan seperti keadilan, kasih sayang, dan kejujuran. Ketika terdapat jurang yang terus-menerus antara telos yang diakui dan jejak aktual, arsitektur itulah yang tertuduh. Seiring waktu, jejak ini berbicara lebih lantang daripada retorika resmi *(Zagzebski, 1996; Roberts dan Wood, 2007; Baehr, 2011).*

Mekanisme-mekanisme ini tidak menjadikan otoritarianisme mustahil. Kebebasan manusia selalu menyisakan kemungkinan untuk merusak bahkan arsitektur terbaik sekalipun. Namun mekanisme ini membuat sakralisasi kekuasaan sewenang-wenang menjadi lebih sulit. Sebaliknya, suatu sistem yang memperlakukan logika murni atau keahlian teknis sebagai penguasa juga dapat menjadi otoriter, tetapi dengan sumber daya internal kritik yang lebih sedikit, karena ia tidak mengakui adanya standar di atas perhitungannya sendiri.

7.4. Keberatan "Sabda yang mana" dan relativisme

Keberatan keempat menyoroti persoalan spesifisitas. Sekalipun disepakati bahwa suatu bentuk Sabda secara struktural diperlukan, dunia berisi banyak klaim tentang *Revelatory Word*. Di dalam dan di antara tradisi, tafsir berbeda tajam. Siapa yang menentukan Sabda mana yang benar. Apakah rujukan kepada Sabda tidak sekadar memindahkan problem relativisme ke tingkat yang lebih tinggi, di mana setiap kelompok memusatkan versinya sendiri dan menyatakan diri dibenarkan.

Arsitektur ini menjawab dalam dua tahap.

Pertama, ia menegaskan perlunya pengujian komparatif. Berbagai klaim Sabda beserta tafsirnya dapat dibandingkan di sepanjang beberapa dimensi: koherensi internal; kompatibilitas

dengan aksioma martabat manusia minimal; kapasitas untuk menopang pengakuan yang stabil atas kesetaraan nilai pribadi; dan jejak Akhlak serta Qualia jangka panjang. Tradisi yang melegitimasi kekejaman, menyangkal kesetaraan dasar, atau secara konsisten menghasilkan pola dominasi dan ketakutan tidak setara kedudukannya dengan tradisi yang melahirkan kerendahan hati, perlindungan terhadap yang rentan, dan kesiapsediaan untuk mengoreksi diri *(MacIntyre, 1988; Fricker, 2007; Medina, 2013).*

Uji ini tidak menghasilkan peringkat mekanis yang harus diterima semua pihak. Uji ini menyediakan kerangka di mana percakapan rasional tentang "Sabda yang mana" dapat berlangsung, alih-alih runtuh menjadi slogan dan kekerasan. Fakta bahwa ketidaksepakatan mendalam tetap ada tidak berarti tidak ada yang bisa dikatakan. Artinya, kerja penelaahan komparatif itu panjang dan menuntut.

Kedua, arsitektur ini memungkinkan diferensiasi peran Sabda di berbagai tingkat kehidupan politik. Pada tingkat terdalam, komunitas dapat terus menghayati artikulasi partikular tentang Sabda dalam ibadah, pengajaran, dan pembentukan moral. Pada tingkat kewargaan, lembaga-lembaga dapat disusun di sekitar afirmasi minimal yang dapat disepakati dari berbagai sudut pandang, misalnya pengakuan atas nilai tanpa syarat setiap pribadi dan ketidakbolehan bentuk-bentuk kerugian tertentu. Afirmasi tersebut dapat dipandang, dari dalam tradisi yang berbeda, sebagai artikulasi parsial dari Sabda masing-masing, tanpa menuntut homogenisasi paksa. Dengan demikian, kita menghindari sekaligus ilusi bahwa semua klaim sama benarnya dan godaan untuk memaksakan satu tradisi yang sangat tebal sebagai norma publik tunggal *(Habermas, 1996; UNESCO, 2021).*

Relativisme, dalam arti ketat bahwa semua klaim sama benarnya, dengan demikian ditolak. The Cohesive Tetrad menegaskan kemungkinan dan keniscayaan penilaian yang kuat, tetapi ditegakkan dengan kerendahan hati dan diuji oleh waktu.

7.5. Keberatan instrumentalisasi

Keberatan terakhir datang dari arah lain. Keberatan ini mengkhawatirkan bahwa dengan menempatkan Sabda di dalam sebuah arsitektur, The Cohesive Tetrad menjadikan wahyu sebagai instrumen belaka. Sabda tereduksi menjadi salah satu komponen dalam kerangka yang dirancang manusia, tunduk pada analisis dan sistematisasi. Bagi orang beriman, hal ini tampak sebagai hilangnya transendensi. Sabda seharusnya mengadili semua arsitektur, bukan dikurung di dalamnya.

Keberatan ini penting, khususnya bagi pembaca yang berasal dari tradisi yang memandang wahyu sebagai hidup dan berdaulat. Tanggapan The Cohesive Tetrad terletak pada pengakuan perbedaan dua tingkat wacana.

Tingkat pertama adalah tingkat konfesional. Di sini Sabda bukan elemen dalam skema konseptual, melainkan Sabda yang hidup, yang memanggil, memerintah, dan menghibur. Pada tingkat ini, kerangka apa pun yang dirancang manusia, termasuk The Cohesive Tetrad, bersifat provisional dan dapat direvisi. Sabda senantiasa memiliki hak untuk membalikkan, merevisi, atau menyingkirkan konstruksi manusia mana pun yang mengklaim telah "menangkapnya".

Tingkat kedua adalah tingkat analitik. Di sini kita menanyakan bagaimana berbagai domain kebenaran bekerja dalam praktik dan bagaimana domain-domain itu dapat diatur agar lembaga-

lembaga menghormati, bukan mengkhianati, telos manusia. Pada tingkat ini, The Cohesive Tetrad diajukan sebagai model untuk berpikir tentang tata kelola kebenaran yang memberi Sabda primasi struktural dan menyediakan peran eksplisit bagi Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment. Model ini tidak mengklaim menghabiskan misteri Sabda. Model ini hanya mengklaim mengartikulasikan cara agar Sabda dapat menuntun lembaga-lembaga tanpa bergantung pada otoritas manusia yang tak terkendali atau pada asumsi diam-diam.

Dipandang dari sudut ini, The Cohesive Tetrad bukan penjara bagi wahyu. Ia adalah upaya untuk merancang ruang kelembagaan dan intelektual yang tetap terbuka untuk diadili oleh Sabda, seraya melindungi komunitas dari penyalahgunaan otoriter atas wahyu dan dari absolutisme yang lebih senyap milik logika murni. Kecukupan arsitektur ini sendiri tunduk pada uji yang sama yang diterapkannya pada kerangka lain: koherensi, kesetiaan pada aksioma martabat minimal, kepekaan terhadap Qualia, kemurnian Mistika, dan Akhlak serta Intention-Trace Alignment jangka panjang dari mereka yang mengadopsinya.

7.6. Ringkasan

Keberatan-keberatan yang dibahas dalam bagian ini bukan tepi periferal. Keberatan-keberatan tersebut muncul tepat di titik di mana arsitektur The Cohesive Tetrad tampak paling rentan: pluralisme, nalar publik, risiko otoritarianisme, masalah "Sabda yang mana", dan bahaya menjadikan wahyu sebagai instrumen. Tanggapan yang ditawarkan tidak mengklaim menutup perdebatan. Tanggapan tersebut bertujuan menunjukkan bahwa arsitektur ini memiliki sumber daya untuk menghadapinya tanpa mundur ke dogmatisme ataupun skeptisisme.

Pluralisme diakui dan ditanggapi melalui klaim berlapis, pengujian komparatif, dan diferensiasi peran Sabda. Nalar publik dibingkai ulang sebagai disiplin penerjemahan dan kerendahan hati, bukan larangan atas komitmen terdalam. Otoritarianisme dilawan dengan membangun sejumlah mekanisme pengawasan internal atas tafsir dan kuasa. Pertanyaan "Sabda yang mana" dihadapi melalui penelaahan komparatif jangka panjang dan afirmasi kewargaan yang saling tumpang tindih. Risiko instrumentalisasi dijawab dengan membedakan tingkat konfesional dan analitik serta dengan menegaskan bahwa arsitektur ini sendiri tetap berada di bawah penghakiman Sabda.

Secara keseluruhan, tanggapan-tanggapan ini tidak menghapus semua alasan kekhawatiran. Namun tanggapan tersebut mengisyaratkan bahwa pilihannya tidak terletak antara logika murni dan wahyu yang tidak akuntabel. Alternatif yang lebih menjanjikan adalah sebuah arsitektur di mana Sabda, Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment diikat bersama dalam disiplin yang ketat. Bagian terakhir akan merangkai seluruh benang argumen dan menunjukkan arah riset lanjutan tentang tata kelola kebenaran di bawah arsitektur ini.

8. Kesimpulan

Artikel ini berangkat dari satu pertanyaan yang sederhana, tetapi tidak kenal ampun: apakah ideologi logika murni, yang bercita-cita mengelola kebenaran hanya dengan rasio dan evidensi, benar-benar mampu menanggung beban yang saat ini diletakkan lembaga-lembaga kontemporer di atasnya. Jawabannya bersifat negatif. Ketika diuji dengan standar yang ia ajukan sendiri, logika murni memperlihatkan kelemahan struktural. Ia tidak mampu meletakkan dasar bagi norma-normanya sendiri tanpa bergantung pada kepercayaan yang

tersembunyi. Ia tidak mampu mempertahankan pemisahan ketat antara fakta dan nilai dalam praktik. Ia tidak mampu menyediakan penjelasan yang kokoh tentang martabat manusia sambil tetap berada dalam bingkai naturalisme yang sempit. Padahal tepat pada dimensi-dimensi inilah hukum modern dan kecerdasan buatan paling dituntut untuk dapat diandalkan.

Dalam perjalanan menuju kesimpulan tersebut, artikel ini berkembang melalui beberapa langkah. Pertama, artikel merekonstruksi ideologi logika murni sebagai sebuah arsitektur yang serius dan menarik. Saintisme, evidensialisme keras, pembelahan tajam fakta-nilai, dan naturalisme kuat tentang telos dan martabat dipaparkan bukan sebagai manusia jerami, tetapi sebagai kecenderungan yang koheren dan secara historis dapat dikenali, yang telah bermigrasi dari filsafat ke "akal sehat" kelembagaan. Logika murni memosisikan diri sebagai penjaga terhadap kesewenang-wenangan, takhayul, dan konflik sektarian. Ia menawarkan visi kehidupan publik yang diatur oleh alasan-alasan yang secara prinsip dapat diperiksa semua orang. Aspirasi ini diakui sebagai sesuatu yang dapat dipahami secara historis dan signifikan secara moral.

Kedua, artikel mengembangkan kritik internal. Tanpa bertumpu pada otoritas eksternal, artikel menunjukkan bagaimana logika murni bergantung pada bentuk-bentuk kepercayaan, normativitas, dan kedalaman makna yang tidak dapat ia hasilkan dari dirinya sendiri. Ia bertumpu pada komitmen dasar tentang keterpahaman realitas dan kelayakan kebenaran, yang tidak dideduksi dari premis-premis sebelumnya. Ia beroperasi di dalam praktik yang kategori dan standarnya sudah terlebih dahulu dipenuhi nilai-nilai. Ia meminjam bahasa martabat dan keluhuran yang tak dapat diganggu gugat, namun kesulitan menjelaskan mengapa bahasa itu layak diambil apa adanya. Masalahnya bukan bahwa logika itu irasional, melainkan bahwa ideologi yang mengangkat logika ke derajat penguasa tunggal menuntut dari logika tugas-tugas yang melampaui mandatnya.

Ketiga, artikel memperkenalkan The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur alternatif bagi tata kelola kebenaran. Alih-alih memperlakukan kebenaran sebagai rezim satu bahasa, artikel ini mengartikulasikan konfigurasi multi-domain di mana Sabda, Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment masing-masing memiliki peran yang terdefinisi. Sabda, sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, menyediakan horizon di dalam mana pertanyaan tentang tujuan dan martabat pertama-tama diajukan. Logika menjernihkan dan menguji, tetapi tidak menetapkan telos. Qualia merekam konsekuensi hidup dari rezim-rezim kebenaran. Mistika menaruh perhatian pada orientasi niat dalam pencarian kebenaran dan dalam pengelolaan kekuasaan. Akhlak dan Intention-Trace Alignment menyediakan diagnosis longitudinal, dengan menanyakan apakah karakter moral dan jejak lembaga-lembaga selaras dengan tujuan yang mereka nyatakan. Diambil bersama, domain-domain ini membentuk sebuah arsitektur yang mempertahankan kekuatan disiplin logis sekaligus mengoreksi klaim berlebihnya.

Keempat, artikel membawa arsitektur ini ke dalam dua ranah krusial: hukum dan kecerdasan buatan. Dalam hukum, artikel menunjukkan bagaimana konsepsi rasionalitas hukum yang berpusat pada logika cenderung melahirkan absolutisme prosedural, penghapusan pengalaman, pengabaian pembentukan karakter, dan pengosongan makna martabat. Dengan memosisikan kembali rasionalitas hukum di dalam The Cohesive Tetrad, menjadi mungkin untuk menegaskan capaian legalitas sekaligus bersikeras bahwa telos, pengalaman hidup, intensi spiritual, dan jejak moral jangka panjang adalah unsur struktural yang relevan dalam mengevaluasi sistem hukum. Dalam kecerdasan buatan, pola serupa muncul. Logika murni yang diterjemahkan ke dalam kode melahirkan sistem yang mengoptimalkan tujuan-tujuan

sempit sambil menyembunyikan ketergantungannya pada keputusan nilai dan intensi kelembagaan yang sudah didahului. Di bawah The Cohesive Tetrad, kecerdasan buatan diposisikan ulang sebagai instrumen yang harus diarahkan oleh Sabda, dibatasi oleh martabat, diinformasikan oleh Qualia, dimurnikan oleh Mistika, dan dinilai melalui Akhlak serta Intention-Trace Alignment.

Kelima, artikel berhadapan dengan serangkaian keberatan besar. Kekhawatiran tentang pluralisme, nalar publik, penyalahgunaan otoritarian atas wahyu, problem "Sabda yang mana", dan risiko instrumentalisasi wahyu ditanggapi secara langsung. Tanggapan-tanggapan tersebut tidak diajukan sebagai kemenangan final, melainkan sebagai demonstrasi bahwa arsitektur ini mampu terlibat dengan keberatan-keberatan tersebut tanpa mundur ke jaminan dogmatis atau kepasrahan skeptis. Langkah kunci di sini adalah membedakan antara klaim struktural bahwa suatu tatanan norm dan telos yang melampaui preferensi semata diperlukan untuk menopang pengakuan martabat secara stabil, dan kerja substantif menelaah bagaimana tradisi-tradisi Sabda yang partikular dapat membentuk kehidupan publik dalam kondisi keberagaman dan kejatuhan manusia.

Kontribusi teoretis utama artikel ini dengan demikian bersifat arsitektural. Artikel ini tidak mengajukan aturan keputusan baru, algoritme baru, atau formula doktrinal baru. Artikel ini mengajukan cara yang berbeda untuk menata domain-domain kebenaran dalam relasi satu dengan yang lain. Dalam penataan ini, logika tidak didudukkan sebagai berhala, tetapi juga tidak direndahkan. Ia dihormati sebagai keterampilan yang tak tergantikan untuk menjaga klaim tetap jujur, tetapi dicegah dari kecenderungan pelan-pelan menggantikan sumber-sumber norm dan telos yang justru memberi makna pada praktiknya sendiri. The Cohesive Tetrad menawarkan kosakata dan kerangka di mana penataan ini dapat dibuat eksplisit, diperdebatkan, dan disempurnakan.

Kontribusi praktisnya terletak pada cara arsitektur ini dapat menginformasikan perdebatan yang sedang berlangsung dalam tata kelola hukum dan kecerdasan buatan. Bagi hukum, arsitektur ini menyarankan kriteria untuk mengevaluasi reformasi yang melampaui kerapian prosedural, dengan menanyakan bagaimana perubahan tersebut akan memengaruhi Qualia mereka yang hidup di bawah hukum dan Akhlak mereka yang mengelolanya. Bagi kecerdasan buatan, arsitektur ini menawarkan cara untuk menafsirkan panduan etika dan proposal regulasi yang sudah ada dalam terang komitmen implisit mereka tentang Sabda, telos, dan martabat, serta untuk mengidentifikasi di mana komitmen-komitmen itu masih kurang berkembang atau tidak konsisten. Di kedua ranah, arsitektur ini mengundang pergeseran dari penyeimbangan nilai secara ad hoc ke penjelasan yang lebih berprinsip tentang bagaimana domain-domain kebenaran berinteraksi.

Artikel ini adalah sebuah permulaan, bukan penutup. Beberapa jalur riset lanjutan segera tampak. Aksioma minimal tentang martabat manusia yang digunakan di sini sebagai landasan normatif memerlukan perumusan dan pengujian lebih rinci lintas konteks hukum dan teknologi. Penerapan The Cohesive Tetrad ke ranah lain, seperti pendidikan, kebijakan ekonomi, atau tata kelola lingkungan, masih menunggu untuk dieksplorasi. Kajian empiris dan historis diperlukan untuk menelaah bagaimana berbagai pengaturan kelembagaan mewujudkan, menyimpangkan, atau menolak arsitektur yang diusulkan ini. Keterlibatan filosofis dengan gagasan-gagasan tandingan tentang normativitas dan wahyu dapat mempertajam sekaligus memperjelas batas kekuatan dan keterbatasan kerangka ini.

Namun satu hal yang telah dibuat sulit untuk disangkal oleh analisis ini adalah berikut ini: ideologi logika murni, jika diambil sebagai arsitektur eksklusif bagi tata kelola kebenaran, tidak mampu memikul beban moral, legal, dan teknologi yang diletakkan di atasnya. Ia akan runtuh ke dalam skeptisisme, atau terus bergantung-tanpa pengakuan-pada fragmen Sabda yang enggan ia namai. Alternatif yang digambar di sini tidak menawarkan penyelesaian yang mudah. Namun alternatif ini mengajukan suatu cara untuk membiarkan Sabda tetap menjadi apa yang diklaimnya, seraya memberi ruang bagi Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment untuk menjalankan peran-peran yang semestinya. Bagi lembaga-lembaga yang ingin tetap rasional sekaligus manusiawi di era hukum dan kecerdasan buatan, pergeseran arsitektural tersebut mungkin bukan sekadar pilihan, melainkan syarat yang tak terhindarkan.

Daftar Pustaka

Baehr, J. S. (2011). *The inquiring mind: On intellectual virtues and virtue epistemology*. Oxford University Press.

Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Belknap Press of Harvard University Press.

Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review*, 1(1), 1-15. https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1

Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press.

Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.

Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.

Haack, S. (2003). *Defending science within reason: Between scientism and cynicism*. Prometheus Books.

John, L. K., Loewenstein, G., & Prelec, D. (2012). Measuring the prevalence of questionable research practices with incentives for truth telling. *Psychological Science*, 23(5), 524-532. https://doi.org/10.1177/0956797611430953

Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389-399. https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2

Krumrei-Mancuso, E. J., & Rouse, S. V. (2016). The development and validation of the Comprehensive Intellectual Humility Scale. *Journal of Personality Assessment*, 98(2), 209-221. https://doi.org/10.1080/00223891.2015.1068174

Kunda, Z. (1990). The case for motivated reasoning. *Psychological Bulletin*, 108(3), 480-498. https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.3.480

MacIntyre, A. (1988). *Whose justice? Which rationality*. University of Notre Dame Press.

Medina, J. (2013). *The epistemology of resistance: Gender and racial oppression, epistemic injustice, and resistant imaginations*. Oxford University Press.

Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 3(2), 1-21. https://doi.org/10.1177/2053951716679679

Mutaqin, A. Z. (2025a). *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran*. OSF Preprints. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D5S7V

Mutaqin, A. Z. (2025b). The Cohesive Tetrad as an epistemic-ethical framework for truth governance under minimal human dignity axioms. *OSF Preprints / PhilArchive*. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D5S7V

Nasr, S. H. (1989). *Knowledge and the sacred*. State University of New York Press.

OECD. (2019). *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence (OECD/LEGAL/0449)*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

O'Neil, C. (2016). *Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy*. Crown.

Putnam, H. (2002). *The collapse of the fact/value dichotomy and other essays*. Harvard University Press.

Roberts, R. C., & Wood, W. J. (2007). *Intellectual virtues: An essay in regulative epistemology*. Oxford University Press.

UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Zagzebski, L. T. (1996). *Virtues of the mind: An inquiry into the nature of virtue and the ethical foundations of knowledge*. Cambridge University Press.